



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2019

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang (Setmenko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) Tahun Anggaran (TA) 2019. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Setmenko Kemaritiman yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja TA 2019. Dalam laporan kinerja TA 2019 disusun hasil capaian sesuai dengan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Setmenko Kemaritiman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Setmenko Kemaritiman Tahun 2015-2019.

Dalam Laporan Kinerja ini disampaikan hasil dan penjelasan capaian kinerja/kegiatan pada Setmenko Marves yang meliputi Biro Perencanaan, Biro Umum dan Biro Informasi dan Hukum sampai akhir TA 2019.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan kedepannya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban; kinerja yang telah ditetapkan; sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Setmenko Kemaritiman; serta bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2020

Sekretaris Kementerian Koordinator


Agung Kuswandono



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Setmenko Kemaritiman diukur berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Setmenko Marves Tahun 2019. Perjanjian Kinerja tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Perencanaan Kinerja disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Setmenko Kemaritiman yaitu membantu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Marves.

Dalam mencapai tujuannya, Kemenko Marves telah mengadopsi sistem *Balanced Scorecard* sebagai metode/alat bantu dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja. Pencapaian kinerja Setmenko Bidang Kemaritiman diukur dengan Indikator Kinerja (IK) yang dirinci sesuai target setiap tahunnya. Indikator Kinerja merupakan ukuran kinerja hasil (*outcome*) yang dihasilkan pada unit kerja eselon I atau melalui kinerja keluaran (*output*) dari unit kerja eselon II dibawahnya yaitu berupa indikator kinerja kegiatan.

Dalam Renstra Setmenko Marves tahun 2015-2019 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Program (SP) yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) Indikator Kinerja (IK). Sesuai dengan hasil reviu dan rekomendasi dari Kementerian PAN-RB ketika mengevaluasi pelaksanaan SAKIP Kemenko Marves, Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) perlu dilakukan perbaikan atau penyempurnaan. Berdasarkan rekomendasi tersebut kemudian dilakukan perubahan/penyesuaian SP dan IK dalam Perjanjian Kinerja, pada Perjanjian Kinerja Setmenko Kemaritiman TA. 2019 terdiri dari 3 (tiga) perspektif yang terbagi dalam 10 SP dan 21 IKP.

Capaian kinerja Setmenko Kemaritiman TA. 2019 adalah 102,52% dengan rincian sebagai berikut:

1. *Customer Perspective* hanya terdiri dari 1 (satu) SP yaitu: Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik dengan capaian 98,35%. SP ini terdiri dari 5 IKP dengan rincian capaian sebagai berikut:
 - a. Nilai lemjauan Reformasi Birokrasi Kemenko Kemaritiman (94,21%)
 - b. Nilai evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (95,70%)
 - c. Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (103,50%)
 - d. Tingkat opini BPK (100%)
 - e. Indeks Maturitas SPIP Kemenko Kemaritiman, sampai laporan ini disusun BPKP yang berwenang memberikan nilai belum menyampaikan hasil penilaian.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

2. *Internal Business Process* tercapai 107,82%, terdiri dari 7 (tujuh) SP dengan rincian capaian sebagai berikut:
 - a. SP.2 Tersedianya teknologi informasi komunikasi yang handal di Kemenko Kemaritiman (94,59%)
 - b. SP.3 Meningkatnya layanan kehumasan (117,14%),
 - c. SP.4 Tersedianya layanan persidangan yang Efektif (110,63),
 - d. SP.5 Terwujudnya layanan hukum dan organisasi (117,50%),
 - e. SP.6 Terwujudnya pengelolaan SDM dan BMN yang handal (110,49%),
 - f. SP.7 Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang Akurat (101,12%),
 - g. SP.8 Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (97,32%).
3. *Learning and Growth* tercapai 97,99%, terdiri dari 2 (dua) SP dengan masing-masing SP terdiri dari 1 IKP, dengan rincian capaian sebagai berikut:
 - a. SP.9 Organisasi dan tata kelola yang baik di Setmenko Kemaritiman (95,58%),
 - b. SP.10 Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Setmenko Kemaritiman (100%)



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR SINGKATAN DAN PENGERTIAN	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	1
1.2. Organisasi dan Personalia	3
1.3. Sistematika Penyajian.....	4
II. PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1. Sasaran Program	6
2.2. Indikator dan Target Kinerja	8
2.3. Program dan Kegiatan.....	10
III. AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja	12
3.1.1. Sasaran Program (SP) 1	15
3.1.2. Sasaran Program (SP) 2.....	25
3.1.3. Sasaran Program (SP) 3.....	26
3.1.4. Sasaran Program (SP) 4.....	30
3.1.5. Sasaran Program (SP) 5.....	31
3.1.6. Sasaran Program (SP) 6.....	35
3.1.7. Sasaran Program (SP) 7.....	39
3.1.8. Sasaran Program (SP) 8.....	46
3.1.9. Sasaran Program (SP) 9.....	47
3.1.10. Sasaran Program (SP) 10.....	49
3.2. Capaian Realisasi Keuangan.....	50
3.3. Analisa Kondisi Sumber Daya Pegawai	53
IV. PENUTUP.....	56
LAMPIRAN	58



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Program Setmenko Tahun 2019	6
Tabel 2 Target Kinerja Setmenko Kemaritiman	8
Tabel 3 Komposisi bobot IKU terhadap Tingkat Kendali dan Tingkat Validitas	9
Tabel 4 Bobot Bukti Hasil Kinerja	10
Tabel 5. Capaian Kinerja TA. 2019	12
Tabel 6 Nilai Capaian Kinerja 2019 per Perspektif per Triwulan.....	14
Tabel 7 Capaian Kinerja Setmenko Kemaritiman TA. 2018.....	14
Tabel 8 Sasaran Program (SP) 1	15
Tabel 9 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Kemaritiman	16
Tabel 10 Nilai AKIP Kemenko Kemaritiman	18
Tabel 11 Capaian Nilai Indeks SPBE Kemenko Marves	21
Tabel 12 Nilai Rerata Capaian Indeks SPBE Nasional Tahun 2018	22
Tabel 13 Level Maturitas SPIP kemenko Kemaritiman.....	24
Tabel 14 Target dan Capaian SP.4 TA. 2019	26
Tabel 15 Persentase Publikasi Bidang Marves TA. 2019	27
Tabel 16 Rekap Jumlah Opini Pemberitaan Bidang Kemaritiman	28
Tabel 17 Persentase Layanan Dokumentasi Bidang Marves TA. 2019	29
Tabel 18 Target dan Capaian SP.5 TA. 2019	31
Tabel 19 Daftar Peraturan Perundang-undangan	32
Tabel 20 Rincian Jumlah SOP di Kemenko Marves	35
Tabel 21 Sasaran Program (SP) 5	35
Tabel 22 Rekap Hasil Penilaian Kompetensi Pejabat.....	36
Tabel 23 Sarana dan Prasarana Kemenko Marves TA. 2019	38
Tabel 24 Capaian Persentase Sarana dan Prasarana TA. 2018	38
Tabel 25 Sasaran Program (SP) 6.....	39
Tabel 26 Rincian Capaian Pelaksanaan SAKIP TA. 2019	41
Tabel 27 Rincian Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA. 2019	42
Tabel 28 Kode dan Nama Keluaran (Output) Kemenko Kemaritiman TA. 2019.....	45
Tabel 29 Hasil penilaian pelaksanaan SAKIP di lingkup Setmenko.....	48
Tabel 30 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman TA. 2019	50
Tabel 31 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman TA. 2018 per Unit Kerja.....	51
Tabel 32 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman TA. 2019 per Keluaran	51
Tabel 33 Realiasi Keuangan per Keluaran Setmenko Kemaritiman Tahun 2018	52
Tabel 34 Realisasi Keuangan per bulan Setmenko Kemaritiman TA. 2019	53
Tabel 35 Jumlah Kondisi Pegawai Setmenko Kemaritiman	54



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tugas dan Fungsi Unit Setmenko Kemaritiman.....	3
Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator.....	4
Gambar 3 Peta Strategis Setmenko Kemaritiman TA. 2019.....	7
Gambar 4 Bagan Nilai Indeks SPBE Kemenko Marves	21
Gambar 5 Suar Maritim	29
Gambar 6 Grafik Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA. 2019	43
Gambar 7 Grafik Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA. 2018	43
Gambar 8 Grafik Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman TA. 2019.....	53



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

DAFTAR SINGKATAN DAN PENGERTIAN

APIP	: Aparat Pengawas Internal Pemerintah
BIH	: Biro Informasi dan Hukum
KP	: Indikator Kinerja Program
IK	: Indikator Kinerja
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKU	: Indikator Kinerja Utama
Kemenko Kemaritiman	: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Menko	: Menteri Koordinator
RB	: Reformasi Birokrasi
Rorein	: Biro Perencanaan dan Informasi
Roum	: Biro Umum
Renstra	: Rencana Strategis
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja
Setmenko Kemaritiman	: Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Sesmenko Kemaritiman	: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
SPIP	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SP	: Sasaran Program
SS	: Sasaran Strategis
TA	: Tahun Anggaran



I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, maka Sekretariat Kementerian Koordinator (Setmenko) Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Setmenko Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018. Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, Setmenko Kemaritiman selama TA. 2019 telah melakukan beberapa kegiatan. Berbagai kegiatan tersebut diadakan dengan maksud agar dapat membantu dan mengawal tugas dan fungsi Setmenko Kemaritiman sehingga target kinerja dapat tercapai.

Sebagai bentuk penyebaran informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2019. Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014. Melalui Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Setmenko Kemaritiman sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Setmenko Kemaritiman dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang ketatausahaan dan protokol, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Dalam Kabinet Indonesia Maju, Kemenko Kemaritiman bertransformasi menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Perubahan ini dikarenakan adanya tambahan penugasan dari Presiden RI untuk melakukan koordinasi di bidang (pengembangan) investasi.

1.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kemenko Kemaritiman Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019. Organisasi Kemenko Kemaritiman sampai dengan unit eselon I selanjutnya



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Perpres ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019.

Sampai dengan peraturan ini disusun, peraturan menteri tentang SOTk belum disusun dan belum dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan dan target kinerja. Sehingga laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Dalam permenko tersebut, Setmenko adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenko Kemaritiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Setmenko Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Sekretariat Kementerian Koordinator;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Sekretariat Kementerian Koordinator;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Setmenko;
4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Rencana Strategis (Renstra) Setmenko Kemaritiman tahun 2016-2019 telah selesai disusun dan ditetapkan dengan SK Sesmenko Nomor: SKEP.11/SESMENKO/MARITIM/X/2016 pada tanggal 20 Oktober 2016. Berdasarkan Renstra tersebut dapat dijabarkan visi, misi dan tujuan Setmenko.

Visi Pelayanan dan Koordinasi yang Berkualitas, Efektif dan Terintegrasi dalam Mendukung Perwujudan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Misi

- ✓ Penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan Kementerian
- ✓ Pembinaan dukungan sumberdaya Kementerian
- ✓ Pembinaan dan koordinasi akuntabilitas kinerja Kementerian

Tujuan:

1. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang berkualitas
2. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya yang baik di Kemenko
Kemaritiman
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemenko Kemaritiman.

1.2. Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Setmenko Kemaritiman terdiri dari:

Gambar 1 Tugas dan Fungsi Unit Setmenko Kemaritiman

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran lintas sektor dan luar negeri, serta monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kementerian, serta penyediaan data dan statistik, pengembangan sistem informasi, dan komunikasi

Biro Perencanaan dan Informasi

Biro Hukum

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan hukum, penyiapan naskah perjanjian, penelaahan dan bantuan hukum, serta pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi,

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan persuratan, pemberian pelayanan yang menunjang pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai, administrasi jabatan fungsional, tata usaha kepegawaian, penyediaan data dan informasi kepegawaian, serta laporan kepegawaian; serta mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan perbendaharaan, tata laksana keuangan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penyelesaian ganti rugi, akuntansi keuangan dan barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara

Biro Umum

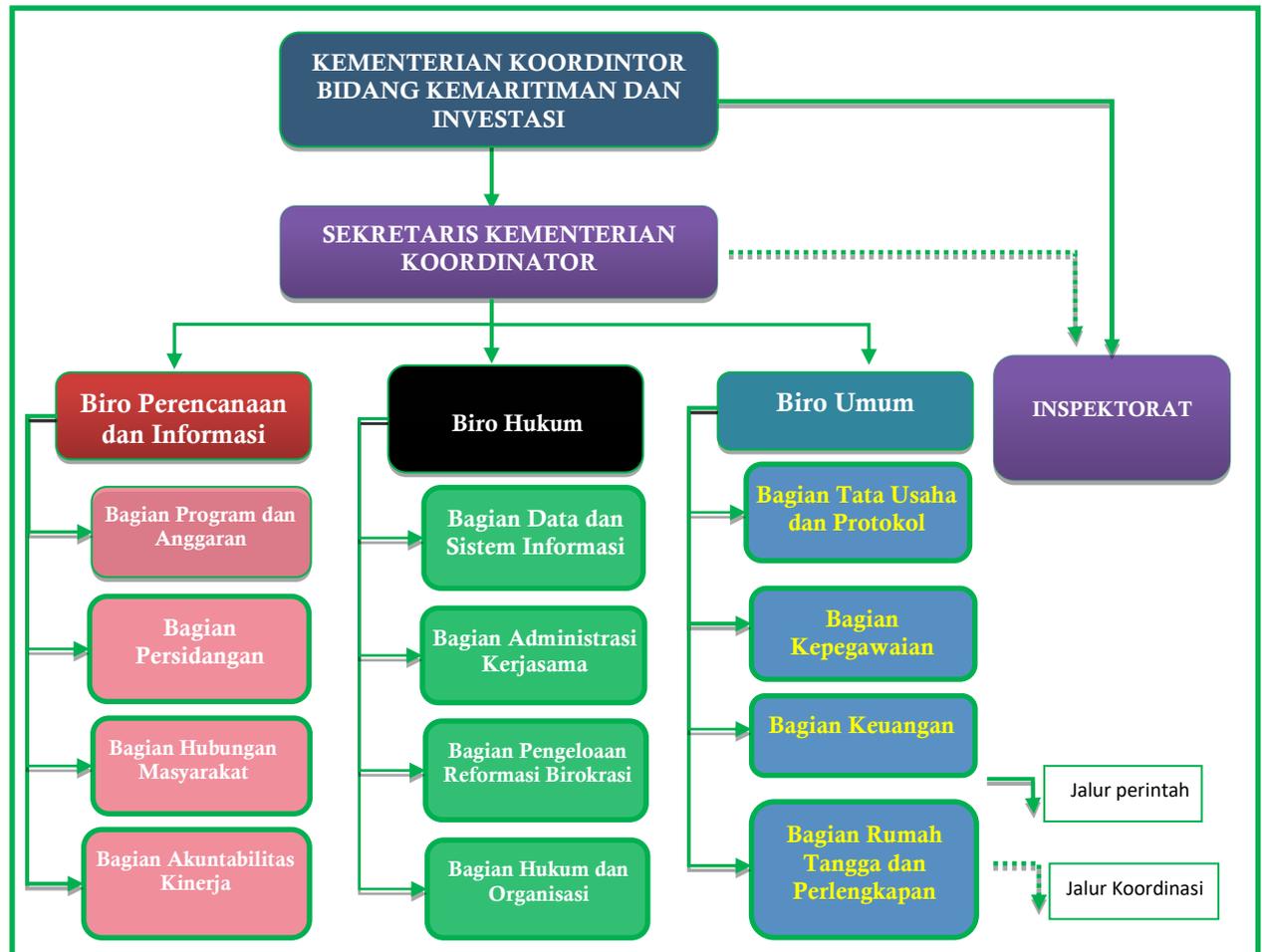
Inspektorat

Bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Setmenko, dipimpin oleh inspektur, dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator



Dalam struktur organisasi Kementerian Kemaritiman, sesuai dengan Permenko No. 1 tahun 2015, Inspektorat di bawah perintah langsung Menteri Koordinator namun dalam operasional dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari berkoordinasi langsung dengan Setmenko. Sehingga dalam penyajian Laporan Kinerja Sekretaris Kementerian ini memasukan capaian kinerja yang dihasilkan/menjadi tanggungjawab Inspektorat.

1.3. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Setmenko Kemaritiman sampai akhir tahun anggaran (TA) 2019. Kemudian membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap capaian kinerja tersebut, sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Setmenko Kemaritiman pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I PENDAHULUAN**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan dan struktur organisasi serta pengelola kinerja program/kegiatan.
2. **Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**, menjelaskan rencana strategis serta penetapan kinerja tahun 2019.
3. **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja program dan keuangan Kinerja Setmenko Kemaritiman pada tahun 2019, kendala dan rekomendasi.
4. **Bab IV PENUTUP**, menjelaskan kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Setmenko Kemaritiman pada tahun 2019 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Menteri Koordinator sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pada tingkat Setmenko Kemaritiman diimplementasikan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta perjanjian kinerja para Kepala Biro. Strategi pencapaiannya digambarkan pada peta strategi Setmenko Kemaritiman sebagai target kinerja yang ditetapkan dan akan direalisasikan secara berkala pada periode masing-masing.

2.1. Sasaran Program

Instansi pemerintah harus memiliki sasaran kerja yang harus dicapai secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan. Target kinerja tahun 2019 dijabarkan melalui tahapan-tahapan dan target kinerja triwulanan Setmenko Kemaritiman.

Pada tanggal 23 April 2019 telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang (Permenko) Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Berdasarkan Permenko tersebut telah terjadi perubahan susunan organisasi pada tingkat eselon II, eselon III dan eselon IV. Walaupun demikian secara substansial di tingkat Sekretariat (eselon I) tidak terdapat perubahan tugas dan fungsi.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka sasaran program Setmenko Kemaritiman tidak mengalami perubahan atau tetap sama seperti sasaran program sebelumnya. Sasaran program Setmenko Kemaritiman TA. 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Sasaran Program Setmenko Tahun 2019

SASARAN PROGRAM	
<i>Customer Perspective</i>	
SP.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
<i>Internal Business Process Perspective</i>	
SP.2	Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
SP.3	Meningkatnya Layanan Kehumasan
SP.4	Tersedianya Layanan Persidangan yang Efektif
SP.5	Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi
SP.6	Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia dan BMN yang Handal
SP.7	Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat



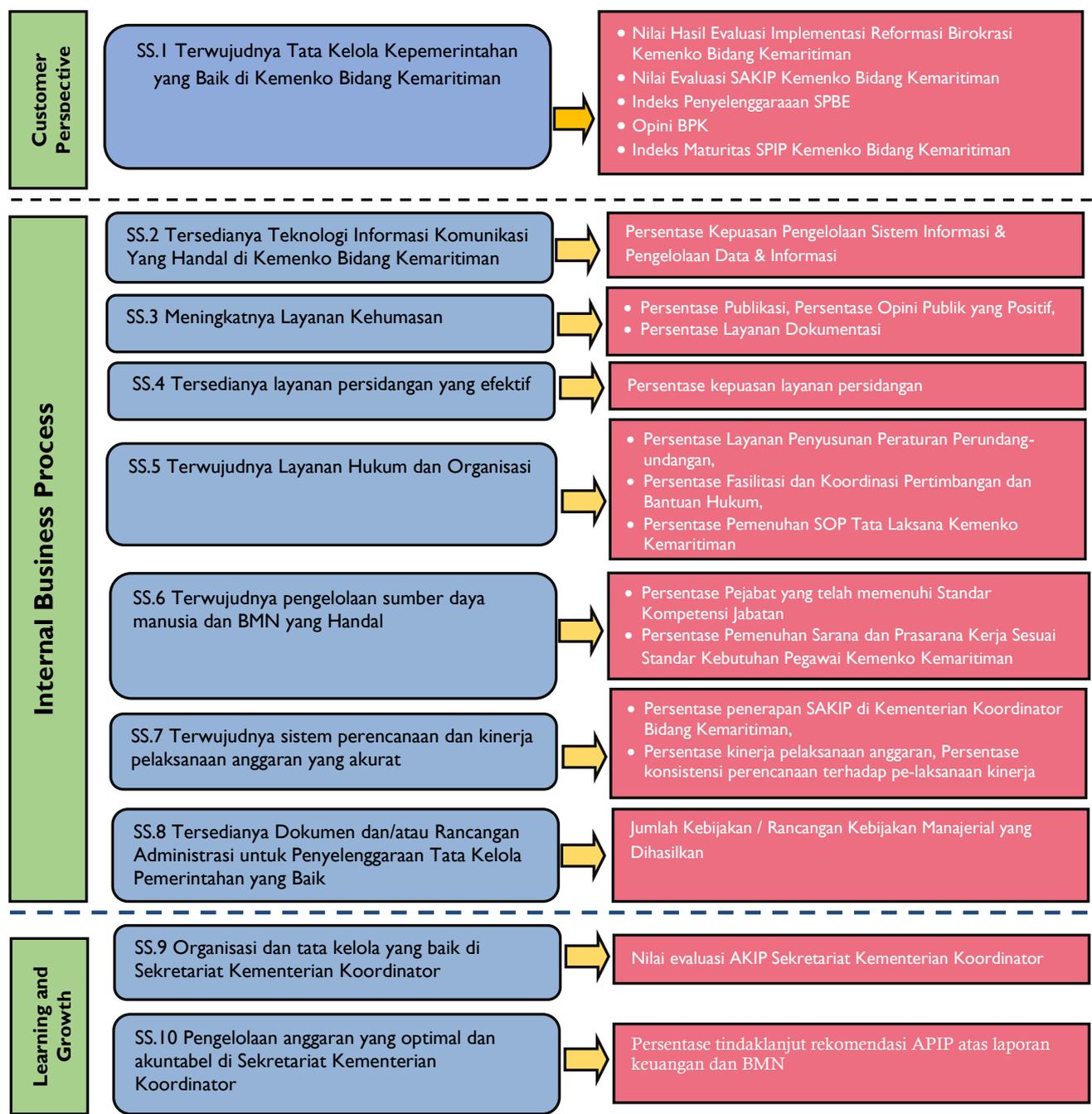
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

SASARAN PROGRAM	
SP.8	Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
<i>Learning & Growth Perspective</i>	
SP.9	Organisasi dan Tata Kelola yang Baik di Sekretariat Kemenko
SP.10	Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator

Berdasarkan sasaran program seperti yang telah disusun di atas maka peta strategis Setmenko Kemaritiman disusun sebagai berikut

Gambar 3 Peta Strategis Setmenko Kemaritiman TA. 2019





2.2. Indikator dan Target Kinerja

Sesuai dengan perjanjian kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ditetapkan target kinerja tahun 2019. Target kinerja ini terdiri dari sasaran program serta indikator kinerja tahun 2019. Tidak semua sasaran program ditargetkan untuk direalisasikan pada Tahun Anggaran 2019.

Adapun rincian target kinerja (sasaran program) Setmenko Kemaritiman TA. 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Target Kinerja Setmenko Kemaritiman

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target 2019
Customer Perspective				
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	70
		2	Nilai evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	70
		3	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2
		4	Opini BPK	WTP
		5	Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman	3
Internal Business Process Perspective				
2	Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang andal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	6	Persentase Kepuasan Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data dan Informasi	70
3	Meningkatnya Layanan Kehumasan	7	Persentase Publikasi	70
		8	Persentase Opini Publik yang Positif	70
		9	Persentase Layanan Dokumentasi	70
4	Tersedianya layanan persidangan yang efektif	10	Persentase kepuasan layanan persidangan	80
5	Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi	11	Persentase Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	80
		12	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum	80
		13	Persentase Pemenuhan SOP Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	80
6	Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia dan BMN yang	14	Persentase Pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target 2019
	Handal	15	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Kebutuhan Pegawai Kemenko Bidang Kemaritiman	80
7	Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat	16	Persentase penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	100
		17	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran	90
		18	Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja	80
8	Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	19	Jumlah Kebijakan / Rancangan Kebijakan Manajerial yang Dihasilkan	15
<i>Learning and Growth</i>				
9	Organisasi dan tata kelola yang baik di Sekretariat Kementerian Koordinator	20	Nilai evaluasi AKIP Sekretariat Kementerian Koordinator	70
10	Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator	21	Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan keuangan dan BMN	100

Penghitungan capaian kinerja adalah dengan membandingkan nilai realisasi capaian dengan target yang ditetapkan. Khusus untuk realisasi yang capaiannya lebih 120% dari target, akan disampaikan/dilaporkan 120%. Hal ini ditetapkan dengan alasan agar unit pelaksana kegiatan dapat merencanakan target kinerja dengan lebih cermat dan sesuai dengan kelayakan berdasarkan kemampuan personil dan anggaran yang ada.

Perhitungan capaian dari realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Menghitung capaian IKU:

a. Penghitungan capaian IKU dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:

- Tingkat kendali dan tingkat validitas suatu IKU, dengan komposisi bobot sebagai berikut:

Tabel 3 Komposisi bobot IKU terhadap Tingkat Kendali dan Tingkat Validitas

Jenis IKU	Exact	Proxy	Activity
High	13.33	8.33	5.00
Moderate	15.00	10.00	6.67
Low	18.33	13.33	10.00



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

- Bukti hasil kinerja, dengan komposisi bobot sebagai berikut:

Tabel 4 Bobot Bukti Hasil Kinerja

Kategori Penilaian	Bobot
Sesuai	100
Belum Relevan	50
Tidak Sesuai	0

- b. Menghitung persentase capaian Indikator Kinerja Utama, yaitu dengan membagi capaian berbanding targetnya

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$$

- c. Menghitung persentase capaian final IKU, yaitu dengan mengalikan Capaian IKU dengan Data Dukung (evidence)

$$\text{Capaian Final IKU} = \text{Capaian IKU} \times \text{Data Dukung}$$

2. Menghitung capaian Sasaran Strategis

Penghitungan didapatkan dengan perkalian antara capaian final IKU dan bobot final kemudian dibagi terhadap total bobot final IKU per SS yang ada targetnya

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Capaian Final IKU} \times \text{Bobot Final IKU}}{\text{Total bobot final IKU yang ada targetnya per SS}}$$

3. Perspektif didapat dari hasil perkalian capaian sasaran dan bobot sasaran kemudian dibagi terhadap total bobot sasaran per perspektif

$$\text{Perspektif} = \frac{\text{Capaian Sasaran} \times \text{Bobot Sasaran}}{\text{Total bobot sasaran per Perspektif}}$$

4. Capaian Kerja Unit dihasilkan dari perkalian capaian perspektif dengan bobot perspektif yang dibagi terhadap total bobot perspektif

$$\text{Capaian kerja Unit} = \frac{\text{Capaian Perspective} \times \text{Bobot perspective}}{\text{Total bobot perspective}}$$

2.3. Program dan Kegiatan

Setmenko Kemaritiman dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Kemaritiman. Program yang dilaksanakan oleh Setmenko Kemaritiman adalah:

1. Penyelenggaraan pelayanan umum perkantoran serta dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

2. Penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi
3. Pengelolaan informasi, persidangan, kehumasan, administrasi dan hukum organisasi
4. Pengawasan akuntabilitas aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
5. Rekomendasi penguatan dan penataan regulasi dan kelembagaan Kemaritiman

Sasaran yang harus dicapai dalam kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan prima kesekretariatan melalui peningkatan penerapan standar pelayanan kesekretariatan
2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, BMN serta hukum dan kelembagaan yang andal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui:
 - a. Pemenuhan SDM yang memenuhi standar kompetensi
 - b. Peningkatan keandalan laporan keuangan dan BMN sesuai ketentuan yang berlaku
 - c. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan untuk seluruh pegawai
 - d. Penerapan pengelolaan sumber daya berbasis IT
 - e. Peningkatan jumlah pemberitaan kementerian di media nasional dan internasional
3. Meningkatnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui:
 - a. Peningkatan penerapan SAKIP lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
 - b. Peningkatan penerapan RB di 8 (delapan) area perubahan
 - c. Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran yang memenuhi standar kementerian keuangan

Sehubungan dengan pencapaian sasaran-sasaran di atas, penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya diarahkan untuk:

1. Peningkatan sistem perencanaan dan kerjasama yang cermat, akurat dan akuntabel serta pengelolaan reformasi birokrasi yang terkoordinasi dengan baik;
2. Penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi, urusan persidangan, urusan hukum dan kehumasan yang optimal;
3. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kesekretariatan dan kerumahtanggaan dengan baik; dan
4. Pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan yang efektif.



III. AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana/target kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Hasil penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan dan menghitung secara matematis yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

3.1. Capaian Kinerja

Jumlah sasaran program (SP) dan indikator kinerja program (IKP) Setmenko Kemaritiman pada TA. 2019, lebih banyak dibanding tahun 2018. Jika di TA. 2018 hanya ada 8 SP dan 14 IKP, maka pada tahun 2019 terdapat 10 SP dan 21 IKP. Pada tahun 2019 ditargetkan sejumlah 7 SP dan 13 IKP, dengan realisasi capaian total sebesar 102,51% dari target. Rincian capaian tersebut sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja TA. 2019

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
Customer Perspective						98,35
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemenko Kemaritiman	1	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Kemaritiman	70	65,95	94,21%
		2	Nilai evaluasi SAKIP Kemenko Kemaritiman	70	66,99	95,70%
		3	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	2,07	103,5%
		4	Tingkat opini BPK	WTP	WTP	100%
		5	Indeks Maturitas SPIP Kemenko Kemaritiman	3	-	-
Internal Business Process Perspective						107,78
2	Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang andal di Kemenko Kemaritiman	6	Persentase Kepuasan Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data dan Informasi	70	66,21	94,59
3	Meningkatnya Layanan Kehumasan	7	Persentase Publikasi	70	106,39	120
		8	Persentase Opini Publik yang Positif	70	77,99	111,41



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
		9	Persentase Layanan Dokumentasi	70	122,01	120
4	Tersedianya layanan persidangan yang efektif	10	Persentase kepuasan layanan persidangan	80	88,50	110,63
5	Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi	11	Persentase Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	80	83,24	104,05
		12	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum	80	90	112,50
		13	Persentase Pemenuhan SOP Tata Laksana Kemenko Kemaritiman	80	78,42	98,03
6	Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia dan BMN yang Handal	14	Persentase Pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50	94	120
		15	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Kebutuhan Pegawai Kemenko Kemaritiman	80	80,78	100,98
7	Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat	16	Persentase penerapan SAKIP di Kemenko Kemaritiman	100	95,80	95,80
		17	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90	94,31	104,79
		18	Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja	90	92,49	102,77
8	Tersedianya Dokumen dan/ atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	19	Jumlah Kebijakan / Rancangan Kebijakan Manajerial yang Dihilangkan	15	15	100
Learning and Growth						98,58
9	Organisasi dan tata kelola yang baik di Setmenko	20	Nilai evaluasi AKIP Setmenko	70	64,37	91,96
10	Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Setmenko	21	Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan keuangan dan BMN	100	100	100,00
Capaian Kinerja Setmenko Tahun 2019						102,51

Keterangan: Capaian sudah dihitung berdasarkan bobot sesuai IKU, SS dan Perspektif

Dari 21 IK, hanya IK.5 yang belum ada nilai capaiannya. Penilaian IK.5 ini dilakukan oleh BPKP, yang sampai laporan ini disusun belum memberikan tingkat maturitas SPIP di Kemenko Kemaritiman. Sehingga dalam penghitungan capaian total kinerja Setmenko tahun 2019, tidak dilakukan penghitungan.

Apabila dilihat capaian berdasarkan perspektif, maka terdapat perubahan target. Sebagian target ditetapkan pada triwulan I dan triwulan II. Hal ini terjadi



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

karena sebagian target tersebut merupakan hasil dari penilaian pihak eksternal, yang dikeluarkan pada periode tersebut.

Tabel 6 Nilai Capaian Kinerja 2019 per Perspektif per Triwulan

Perspektif	Bobot (%)	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Customer	30	66,12	82,62	-	98,35
Internal Business Process	45	89,61	105,88	100,01	107,82
Learning and Growth	25	100	95,98	-	97,99
		82,54	94,83	100,01	102,51

Pada tabel di atas terlihat bahwa capaian total kinerja Setmenko Kemaritiman TA. 2019 sebesar 102,52% dari target yang ditetapkan. Jika nilai capaian ini dibandingkan dengan realisasi TA. 2018 (tabel 7), maka capaian TA. 2019 lebih rendah 0,63%. Walaupun nilai capaian tahun 2019 lebih rendah, namun secara kualitas lebih baik, karena indikator yang ditargetkan lebih banyak (21 indikator) berbanding 14 indikator di tahun 2018. Sehingga pencapaian target tahun 2019 lebih sulit diraih dibandingkan tahun 2018.

Tabel 7 Capaian Kinerja Setmenko Kemaritiman TA. 2018

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
Customer Perspective				
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1. Nilai kemajuan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	70	62,83	94,88
	2. Nilai evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	60	63,54	102,95
	3. Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	50	-	-
	4. Tingkat opini BPK	100	100	100
Internal Business Process				
2. Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang andal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	5. Tingkat kepuasan layanan Teknologi Informasi Komunikasi	70	94,69	117,64
3. Tersedianya layanan persidangan yang efektif	6. Tingkat kepuasan layanan persidangan	70	80	107,14
4. Terwujudnya standar pelayanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	7. Persentase tersedianya SOP Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	80	98,88	111,80
5. Terwujudnya pengelolaan	8. Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi	50	40,50	90,50



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
sumber daya manusia dan BMN yang andal	Standar Kompetensi Jabatan			
	9. Persentase ketersediaan sarana kerja pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	95	86,53	97,38
6. Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat	10. Persentase penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	100	98,63	99,12
	11. Persentase kinerja pelaksanaan anggaran	75	92,73	111,82
	12. Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja	90	90,48	100,27
Learning and Growth				
7. Organisasi dan tata kelola yang baik di Sekretariat Kementerian Koordinator	13. Nilai evaluasi AKIP Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	60	73	110,83
8. Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator	14. Persentase tindaklanjut rekomendasi APIP atas laporan keuangan dan BMN	100	100	98,98
NILAI TOTAL CAPAIAN KINERJA				103,15

Penjelasan dan rincian dari masing-masing Sasaran Program dan Indikator Kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran Program (SP) 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Sasaran Program 1 ini memiliki 4 (empat) indikator kinerja dengan target dan realisasi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 8 Sasaran Program (SP) 1

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Kemaritiman	5,71	70	65,95	94,21%
2	Nilai evaluasi SAKIP Kemenko Kemaritiman	5,71	70	66,99	95,70%
3	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	5,71	2	2,07	103,5%
4	Tingkat opini BPK	5,71	WTP	100	100%
5	Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman	5,71	3	-	-
Nilai Capaian SP.1					98,35%



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Tujuan dari sasaran program ini adalah terlaksananya peningkatan akuntabilitas pemerintahan yang lebih baik dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan sehingga pelaksanaan dan layanan di Kemenko Kemaritiman berjalan baik. Seperti ditampilkan dalam tabel di atas, SP.1 ini memiliki 5 (lima) IKP. Dalam perjanjian kinerja, SP.1 ini memiliki memiliki bobot 30% dari total sasaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target pada tahun lalu, maka pada tahun 2019 ini terdapat penambahan 1 (satu) IKP, yaitu IKP.5 Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman.

Capaian dan rincian penjelasan dari capaian SP.1 ini adalah sebagai berikut:

IKP.1 Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Nilai kemajuan reformasi birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah nilai penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Nilai yang digunakan dalam mengukur capaian IKP.1 ini adalah nilai hasil evaluasi Kementerian PANRB atas pelaksanaan RB pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, IKU ini meliputi 8 (delapan) area perubahan (tabel 19).

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko Marves TA. 2019 telah dilksankan. Namun sampai laporan ini disusun, hasil penilaian belum terbit. Seperti dengan tahun-tahun sebelumnya, hasil penilaian dari KemenPANRB baru terbit pada triwulan II tahun berikutnya. Sehingga pada laporan ini digunakan hasil penilaian RB TA. 2018 yang terbit pada triwulan II tahun 2019.

Dari hasil evaluasi oleh Kementerian PANRB, nilai indeks reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah 65,95 dengan kategori “B”, naik 3,13 poin dari tahun sebelumnya (62,82) Sehingga nilai capaian IKU.13 ini adalah 97,11% dari target (70).

Adapun rincian penilaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Kemaritiman

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2016	2017	2018
A	Pengungkit				
1	Manajemen perubahan	5	3,03	3,18	3,22
2	Penataan peraturan perundang-undangan	5	2,09	2,71	2,81
3	Penataan dan penguatan organisasi	6	3,68	3,84	3,87
4	Penataan tata laksana	5	1,91	2,41	2,43
5	Penataan sistem manajemen SDM	15	9,78	11,16	11,45
6	Penguatan akuntabilitas	6	3,92	4,35	4,38



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2016	2017	2018
7	Penguatan pengawasan	12	5,11	5,11	5,19
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	6	2,61	2,46	2,49
	Sub total komponen pengungkit (A)	60,00	32,12	35,22	35,84
B	Hasil				
1	Nilai akuntabilitas kinerja	14	8,13	11,21	13,45
2	Survei internal integritas organisasi	6	3,98		
3	Survey eksternal persepsi korupsi	7	5,95	8,84	8,86
4	Opini BPK	3	2,00		
5	Survey eksternal pelayanan publik	10	8,17	7,55	7,80
	Sub komponen hasil (B)	40	28,22	27,60	30,11
	Indeks Reformasi Birokrasi	100	60,34	62,82	65,95

Pada tabel 9 di atas, terlihat bahwa nilai indeks RB Kemenko Kemaritiman terus mengalami peningkatan sejak pertama penilaian (tahun 2016). Pada komponen pengungkit berhasil naik 3,1 poin tetapi pada komponen hasil turun 0,62 poin.

Dari 13 (tiga belas) unsur penilaian, terdapat 2 (dua) unsur yang masih mempunyai nilai jelek (dibawah 50%), yaitu penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara unsur pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (didapatkan dari unsur survey eksternal persepsi korupsi dan opini BPK) mempunyai capaian terbaik.

Dari capaian IKU.13 ini terdapat beberapa yang mendorong keberhasilan capaian ini, yaitu komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kemenko Kemaritiman, penyediaan anggaran yang memadai, terdapatnya sub bagian khusus yang menangani reformasi birokrasi serta semangat para pegawainya dalam menciptakan kementerian yang baik dan berhasil mewujudkan cita-cita pendiriannya.

Kemenko Kemaritiman juga telah secara rutin (karena keterbatasan SDM pelaksana APIP) meminta bantuan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk dapat mengirimkan auditor (dengan berbagai tingkat keahlian) sebagai anggota tim pengawas pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan teknis, pengelolaan keuangan maupun dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP. Kementerian Kemaritiman juga pada tahun 2019 telah menerima 7 (tujuh) orang CPNS pelaksana APIP.

IKP.2 Nilai Evaluasi SAKIP Kemenko Kemaritiman

Tujuan evaluasi ini juga untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Nilai evaluasi ini juga menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi Kemenko Kemaritiman dalam



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

penggunaan anggaran terhadap capaian kinerjanya. Tujuan evaluasi ini juga untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Target Indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah 70. Indikator kinerja ini ditargetkan untuk direalisasikan pada Triwulan I tahun 2019. Sama dengan IKP.1, IKP.2 ini juga merupakan indikator yang penilaiannya dilaksanakan oleh Kementerian PANRB.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, Kemenko Kemaritiman mendapatkan nilai 66,99 atau kategori **B**. Ini berarti untuk IKP.2 ini berhasil mencapai 97,85% dari target. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kemenko Kemaritiman sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Rincian Penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Nilai AKIP Kemenko Kemaritiman

No	Komponen	Bobot	Nilai		
			2016	2017	2018
1	Perencanaan Kinerja	30	19,84	20,73	20,94
2	Pengukuran Kinerja	25	13,90	14,81	15,95
3	Pelaporan Kinerja	15	9,68	10,69	10,85
4	Evaluasi Internal	10	3,56	4,92	6,40
5	Capaian Kinerja	20	11,06	12,39	12,85
Nilai Hasil Evaluasi		100	58,04	63,54	66,99
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	B	B

Dari tabel 10, nilai SAKIP Kemenko Kemaritiman tahun 2016-2018 naik 4,5 dan 3,45. Selain itu terlihat bahwa semua unsur dalam penilaian SAKIP mengalami peningkatan nilai. Secara persentase, peningkatan terbaik pada unsur evaluasi internal (13,60%). Sementara unsur yang paling tinggi nilainya (berbanding nilai maksimal) adalah unsur pelaporan kinerja (71,27%). Walaupun demikian terlihat bahwa evaluasi internal masih unsur yang nilai persentasenya terkecil (49,20%). Kenaikan pada seluruh komponen ini menunjukkan bahwa proses SAKIP terus mengalami peningkatan/perbaikan.

Capaian pelaksanaan SAKIP di Kemenko Kemaritiman berdasarkan hasil evaluasi tersebut adalah berikut ini:

1. Kemenko Marves sudah mulai menerapkan manajemen kinerja, namun baru dilaksanakan secara formal belum mampu menumbuhkan budaya kinerja pada



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

- setiap jenjang manajerial unit kerja untuk melakukan reviu atas capaian kinerja secara berkala dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang nyata;
2. Kemenko Marves sudah membangun manajemen kinerja dengan model *balance scorecard* serta telah membangun aplikasi yang berbasis kinerja (SIKM) sehingga dapat dipantau kinerja secara langsung dan *real time* dan sebagai upaya membangun data dan laporan kinerja (*database* kinerja);
 3. Dokumen akuntabilitas kinerja yaitu perencanaan startegis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja secara formal telah disusun dengan baik serta dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang lebih baik dari sebelumnya, namun belum dimanfaatkan secara optimal;
 4. Belum terdapat penyelerasan kinerja secara berjenjang/*Cascading* kinerja yang baik, sehingga belum terwujud keselarasan kinerja antara sasaran dengan kegiatan dan subkegiatan. Dengan demikian belum dapat dilakukan efisiensi anggaran untuk mengurangi kegiatan/subkegiatan yang tidak mendukung tujuan dan sasaran Organisasi;
 5. Evaluasi internal yang telah dilakukan terhadap penerapan SAKIP unit kerja belum dilakukan secara maksimal sehingga belum memberikan hasil yang maksimal untuk mendorong perbaikan AKIP pada masing-masing unit kerja.

Dari capaian IKP.2 ini terdapat beberapa yang mendorong keberhasilan capaian ini, yaitu komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kemenko Bidang Kemaritiman, penyediaan anggaran yang memadai, terdapatnya Sub Bagian khusus yang menangani reformasi birokrasi, serta semangat para pegawainya dalam menciptakan kementerian yang baik dan berhasil mewujudkan cita-cita pendiriannya.

Kemenko Kemaritiman juga telah meminta bantuan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk dapat mengirimkan auditor (dengan berbagai tingkat keahlian) sebagai anggota tim pengawas pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan teknis, pengelolaan keuangan maupun dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP. Kemenko juga pada tahun 2019 telah melantik 2 auditor baru dan menerima calon auditor (PNS) baru sebanyak 7 orang.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja, diekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terus mendorong penerapan manajemen kinerja dengan meningkatkan keselarasan ukuran-ukuran kinerja organisasi, proses bisnis yang mendasari pencapaian kinerja, kualitas dan kapasitas SDM Aparatur yang sesuai dengan kinerja yang diharapkan, sehingga kinerja yang akan diwujudkan akan menjadi dasar dalam menetapkan proses bisnis organisasi dan standar kompetensi pegawai. Hal ini penting untuk mewujudkan *performance based organization* agar tercipta organisasi yang efektif dan efisien;



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

2. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-kinerja sehingga pada saat pelaporan dan evaluasi kinerja telah tersedia data dan informasi kinerja secara terdokumentasi dengan baik;
3. Memperkuat komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
4. Melakukan supervisi atas pengumpulan data kinerja agar menghasilkan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan reviu terhadap kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan sasaran strategis, dan memastikan bahwa hasil reviu ini digunakan untuk mengalokasikan anggaran yang ditujukan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan pemilihan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran Organisasi;
6. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP untuk melakukan evaluasi implementasi system AKIP kepada unit kerja

IKP.3 Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah nilai yang menggambarkan tingkat kematangan dari pelaksanaan SPBE yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 5 Tahun 2018. Permen ini mengatur tentang pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (untuk kemudian disingkat SPBE).

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik
(indeks minimal 2,6)

Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Sementara tujuan SPBE itu sendiri adalah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik di instansi pusat maupun pemerintah daerah.

Evaluasi SPBE didasarkan pada Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

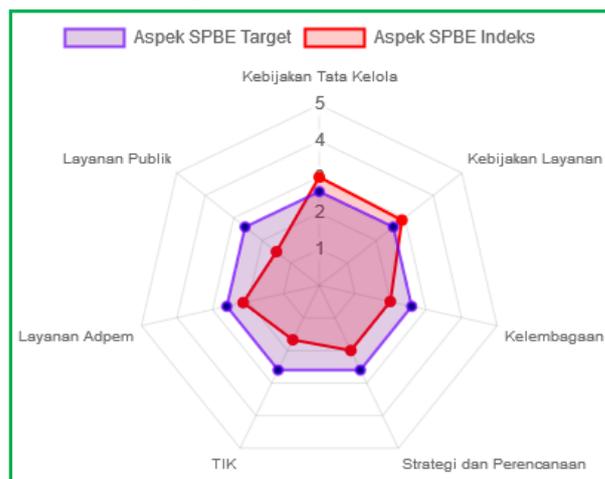
mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Nilai Indeks SPBE tahun 2019 ditargetkan sebesar 2,0. Hasil penilaian tersebut adalah sebagaimana tabel 11 adalah 2,07. Sehingga capaian dari IKU ini adalah 103,50% dari target. Nilai ini mengalami peningkatan dari nilai tahun 2018 (tabel 20) sebesar 0,35 atau naik sebesar 19,44%.

Tabel 11 Capaian Nilai Indeks SPBE Kemenko Marves

INDEKS	NILAI	INDEKS	NILAI
2019		2018	
Domain Kebijakan SPBE	2,94	Domain Kebijakan SPBE	2,00
Kebijakan Tata Kelola SPBE	3,00	Kebijakan Tata Kelola SPBE	0,53
Kebijakan Layanan SPBE	2,9	Kebijakan Layanan SPBE	1,47
Domain Layanan SPBE	1,91	Domain Layanan SPBE	1,79
Administrasi Pemerintahan	2,14	Administrasi Pemerintahan	1,36
Pelayanan Publik	1,5	Pelayanan Publik	0,42
Domain Tata Kelola	1,86	Domain Tata Kelola	1,71
Kelembagaan	2,00	Kelembagaan	0,57
Strategi dan Perencanaan	2,00	Strategi dan Perencanaan	0,57
TIK	1,67	TIK	0,57
Nilai Total SPBE	2,07	Nilai Total SPBE	1,8

Gambar 4 Bagian Nilai Indeks SPBE Kemenko Marves



Dari hasil penilaian tersebut, maka capaian SPBE Kemenko Marves dalam kategori cukup atau sedikit di atas rerata nasional tahun 2018, namun masih di bawah rerata kementerian/lembaga (hanya lebih baik dari rerata SPBE tingkat kabupaten/kota se Indonesia). Nilai capaian SPBE Kemenko Kemaritiman masih cukup jauh dibanding nilai SPBE tertinggi (nilai instansi-instansi yang bersedia data

capaiannya diumumkan) Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 3,85



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Tabel 12 Nilai Rerata Capaian Indeks SPBE Nasional Tahun 2018

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	1,98	2,97	2,73	2,06	2,27	1,77	2,17
Domain Kebijakan	1,75	2,68	2,36	1,76	2,05	1,53	1,90
Kebijakan Tata Kelola	1,64	2,45	2,20	1,78	1,97	1,43	1,81
Kebijakan Layanan	1,82	2,84	2,47	1,74	2,10	1,61	1,94
Domain Tata Kelola	1,74	2,71	2,67	2,08	2,08	1,50	1,90
Kelembagaan	1,61	2,51	2,37	1,91	1,85	1,39	1,79
Strategi & Perencanaan	1,80	2,63	2,63	2,07	2,22	1,56	1,98
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,79	2,88	2,89	2,21	2,13	1,53	1,90
Domain Layanan SPBE	2,17	3,20	2,87	2,14	2,44	1,98	2,39
Administrasi Pemerintahan	2,33	3,31	2,95	2,61	2,63	2,15	2,52
Layanan Publik	1,90	3,00	2,73	1,92	2,12	1,66	2,13

Dari hasil evaluasi oleh KemenPANRB, terdapat kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan SPBE di Kemenko Kemaritiman, yaitu:

1. Kebijakan Tata Kelola: telah memiliki kebijakan tentang tim pengarah SPBE, namun belum mencantumkan dalam kebijakannya yang nyata masalah tentang integrasi proses bisnis, rencana induk SPBE, anggaran dan belanja TIK, pengoperasian pusat data, integrasi sistem aplikasi dan aplikasi umum berbagi pakai.
2. Kebijakan Layanan: telah memiliki kebijakan tentang layanan di bidang naskah dinas, manajemen kepegawaian, perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan, manajemen kinerja, pengadaan, pengaduan publik, dokumentasi dan informasi hukum, *whistle blowing system* dan publik instansi pemerintah.
3. Kelembagaan: telah memiliki tim pengarah SPBE, tetapi belum menetapkan tugas pokok masing-masing anggota tim SPBE, serta belum memetakan proses bisnis yang terintegrasi antar masing-masing unit kerja.
4. Strategi dan Perencanaan: telah memiliki rencana induk SPBE, tetapi belum memasukkan anggaran dan belanja TIK lengkap beserta tahun penerapannya ke dalam dokumen rencana induk SPBE.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi: telah memahami arti pentingnya penerapan SPBE, dan menerapkan sebagian aplikasi umum berbagai pakai pada sebagian unit kerja, tetapi belum membangun pusat data, melakukan integrasi sistem aplikasi dan menerapkan aplikasi umum berbagi pakai terhadap seluruh unit kerja di lingkungan kementerian.
6. Administrasi pemerintahan: penerapan layanan naskah dinas, manajemen kepegawaian, manajemen perencanaan, keuangan, manajemen kinerja dan pengadaan, baru pada sebagian unit kerjanya yaitu.
7. Pelayanan Publik Kekuatan: telah menyediakan sebagian layanan publik yang berbasis elektronik. Sayangnya masih belum banyak menampilkan informasi atau memberikan layanan terhadap publik yang berbasis elektronik diantaranya adalah aplikasi pengaduan publik, *Whistle Blowing System*, dan beberapa aplikasi yang di buat sendiri sesuai kebutuhan masing-masing instansi.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

IKP.4 Tingkat Opini BPK

Tingkat opini BPK adalah pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa (audit) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini Bpk yang menjadi sasaran target pada TA. 2019 adalah opini BPK hasil pelaksanaan penggunaan anggaran pada TA. 2018. Hal ini disebabkan karena Opini BPK TA. 2019 baru disampaikan pada akhir triwulan I atau di Triwulan II TA. 2020.

Kemenko Marves dalam pengelolaan (perencanaan, pengajuan pencairan dan pertanggungjawaban penggunaan) pada tahun kedua setelah pelaporan penggunaan anggaran satker tersendiri, telah berhasil mencatatkan laporan keuangan yang wajar dalam pemeriksaan BPK (TA. 2016) dengan predikat WTP. Predikat WTP ini telah berhasil dipertahankan untuk 2 tahun anggaran berturut-turut (2016 dan 2017). Berdasarkan dua hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2018 juga ditargetkan untuk dapat kembali meraih predikat WTP.



Sesuai dengan laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Kemaritiman Tahun 2018 Nomor; 17.B/LHP/XVII/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 BPK kembali memberikan predikat WTP atau sesuai 100% dengan target yang ditetapkan.

Beberapa kondisi yang mendorong keberhasilan adalah:

1. Adanya semangat yang kuat untuk mempertahankan opini WTP dari tahun sebelumnya (kondisi internal);
2. Semangat untuk menyamakan perolehan opini terbaik yang sama dengan opini yang diperoleh oleh sesama Kementerian Koordinator dan sebagai Kementerian yang baru dibentuk (kondisi eksternal);
3. Dukungan dan komitmen dari semua level pimpinan.

Pada TA. 2018, Kemenko Kemaritiman selain ketiga hal di atas, juga telah melaksanakan efektifitas kegiatan yang berimbas pada efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran dan manusia) yang digunakan, dengan menerapkan penyusunan jumlah anggaran yang dibutuhkan secara proporsional dan akuntabel.

Adapun program atau kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian target kinerja ini adalah:

1. Program peningkatan jumlah dan kapasitas pengelola keuangan melalui kegiatan berupa sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat penyusunan pertanggungjawaban keuangan;
2. Program melakukan *update* standar operasi prosedur (SOP) dan aturan internal lainnya sebagai bentuk kepatuhan (*compliance*);



3. Memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu atau sebagai *tools* dalam penyelesaian pekerjaan.

IKP.5 Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman

Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman adalah indikator atau hasil pengukuran sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman. Indeks Maturitas SPIP digunakan untuk mengukur pengendalian internal pelaksanaan SPIP apakah telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian maturitas dilaksanakan dengan beberapa aspek, yaitu aspek desain pengendalian intern (*control design*); serta aspek penerapannya (*control implementation*). Aspek desain menyangkut masalah ada tidaknya dan baik tidaknya rancangan pengendalian intern suatu organisasi. Aspek penerapan terkait erat dengan efektif tidaknya pelaksanaan rancangan pengendalian yang ada. Dengan demikian, organisasi yang maturitas sistem pengendaliannya baik akan memiliki rancangan pengendalian yang tepat dan melaksanakan rancangan itu secara efektif dalam seluruh aktivitasnya.

Pedoman penilaian SPIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016. Satuan ukurnya adalah level maturitas skala dari level 0 sampai level 5. Dalam peraturan tersebut penilaian merinci level maturitas SPIP menjadi enam tingkatan sebagai berikut:

Tabel 13 Level Maturitas SPIP kemenko Kemaritiman

No	Level	Keterangan
0	Belum ada	Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian intern.
1	Rintisan	Praktik pengendalian intern bersifat <i>ad hoc</i> dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan.
2	Berkembang	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektivitasnya.
3	Terdefinisi	Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai.
4	Terkelola dan terukur	Pengendalian intern diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi.
5	Optimum	Pengendalian intern diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis.

Sampai dengan laporan ini disusun, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selalu instansi yang berwenang menilai indeks maturitas, belum memberikan penilaian Indeks mMaturitas Kemenko Marves.



3.1.2. Sasaran Program (SP) 2

Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Tujuan dari sasaran program ini adalah tersedianya saluran atau sarana (teknologi informasi komunikasi yang handal) yang dapat dipakai untuk melakukan pengelolaan informasi secara elektronik sekaligus dapat mempublikasikannya, program dan kegiatan di lingkup Kemenko Kemaritiman. Sasaran Program ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja (IKP.5) yaitu: **Persentase Kepuasan Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data dan Informasi**. Indikator ini merupakan indikator yang baru ditargetkan pada triwulan IV.

Persentase kepuasan Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data dan Informasi adalah seberapa besar/banyak pengguna informasi merasakan puas akan layanan pengelolaan sistem informasi serta pengelolaan data dan informasi tersebut. Tujuan penetapan IKP ini adalah untuk mengetahui apakah sistem informasi serta pengelolaan data dan informasi tersebut benar-benar tersedia untuk meningkatkan kapabilitas Kemenko Kemaritiman dalam memberikan layanan Teknologi Informasi kepada pengguna. Formula pengukurannya adalah dengan menggunakan hasil survey tingkat kepuasan publik (pengguna).

Pengukuran kepuasan ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepuasan terhadap: kemudahan akses dan ketersediaan koneksi/akses internet di kantor; layanan webmail maritim; layanan aplikasi nota dinas elektronik (NDE); serta kelancaran akses terhadap aplikasi yang menggunakan server/infra internal.

Sampel untuk kuesioner terdiri dari 232 kuesioner diberikan secara acak pada pegawai Kemenko Marves, di mana 121 responden melakukan pengisian. Dari hasil perhitungan persentase didapatkan nilai persentase 66,21%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kepuasan dari Layanan Teknologi dan Sistem Informasi pada Kemenko Kemaritiman (dari responden yang mengisi kuesioner) adalah sebesar 97,29% dari target.

Realisasi kepuasan responden yang tidak mencapai target terutama disebabkan karena terjadinya kendala dalam kelancaran jaringan internet. Hal ini terjadi karena beberapa saat sebelum kuesioner dibagikan masih dalam proses pemindahan server dan provider layanan internet. Selain itu keterbatasan staf pengelola sistem/teknologi informasi juga turut menyumbang ketidakpuasan. Sesuai dengan Permenko No. 2 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Sub Bagian informasi dilebur dengan sub bagian pengolahan data. Sehingga kekurangan staf pengelola sistem informasi terutama perangkat keras (hardware).

Untuk itu disarankan agar segera menambah personil baik berupa ASN maupun tenaga kontrak lepas yang mempunyai keahlian di bidang teknologi informasi baik di perangkat keras maupun perangkat lunak (software).



3.1.3. Sasaran Program (SP) 3

Meningkatnya Layanan Kehumasan

Sasaran SP.4 ini adalah: meningkatnya layanan kehumasan (jumlah dan frekuensi materi informasi, pemanfaatan media baik arus utama maupun sosial, penyusunan strategi komunikasi, serta membangun opini dan menjaga citra positif organisasi) di lingkungan Kemenko Kemaritiman. SP.4 ini ditetapkan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kehumasan sebagai alat untuk memperkenalkan Kemenko Kemaritiman dan program-program serta capaiannya kepada masyarakat secara berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan menyeluruh.

SP.4 memiliki 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 14 Target dan Capaian SP.4 TA. 2019

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Publikasi	3,57	70	106,39	120 *)
2	Persentase Opini Publik yang Positif	5,71	70	77,29	111,41
3	Persentase Layanan Dokumentasi	4,29	70	122,01	120 *)
Nilai Capaian SP.1					117,14%

*) Menggunakan nilai capaian maksimum 120%

Realisasi SP.4 pada TA. 2019 adalah 117,14%. Pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada SP seperti ini (belum ditargetkan). Rincian hasil dan penjelasan capaian SP. 4 adalah sebagai berikut:

IKP.7 Persentase Publikasi



Persentase Publikasi adalah persentase publikasi dan informasi publik terkait kegiatan Kemenko Marves yang telah dibuat (dipublikasikan) dibandingkan dengan yang direncanakan. Tujuan IKP.7 ini adalah untuk mengukur capaian pelaksanaan publikasi dan pembuatan/penyediaan informasi publik. Melalui publikasi diharapkan program kegiatan dan capaian

Kemenko Kemaritiman dapat dikenal/ disebarluaskan kepada masyarakat. Sehingga keberadaan/fungsi kementerian bisa dikenal masyarakat. Publikasi ini disebarluaskan kepada publik melalui berbagai media seperti *website* dan media sosial resmi milik Kemenko Kemaritiman. Langkah kegiatan dalam penyebarluasan atau publikasi ini terdiri dari: penyelenggaraan konferensi pers; penerbitan majalah kemaritiman; forum pemimpin redaksi media/pers; penyelenggaraan penyediaan informasi publik multimedia; workshop kehumasan; kunjungan media; reportase;



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

dokumentasi, pendampingan kunjungan; pembuatan dan penayangan PSA; dan forum wartawan.

Berdasarkan capaian selama TA. 2019, Biro Perencanaan dan Informasi selaku unit penanggung jawab IKP.7 ini, berhasil merealisasikan kegiatan publikasi sebesar 106,39% dari rencana (kegiatan yang diminta dipublikasikan) yang ditentukan. Nilai ini merupakan nilai rerata realisasi dari 4 triwulan pada TA. 2019, yaitu dengan rincian capaian sebagai berikut: triwulan I 75%; triwulan II 120%; triwulan III 118,25% dan triwulan IV 120%. Sehingga rerata realisasi IKP.7 adalah 106,39%. Sehingga capaian IKP.7 ini adalah 120% (nilai capaian maksimal) dari target (70%).

Tabel 15 Persentase Publikasi Bidang Marves TA. 2019

No	Bulan	Target/ Permintaan	Realisasi
1	Januari	15	20
2	Februari	15	25
3	Maret	15	28
4	April	15	19
5	Mei	15	27
6	Juni	15	18
TOTAL		90	137

No	Bulan	Target/ Permintaan	Realisasi
	Juli	15	32
	Agistis	15	32
	September	15	32
	Oktober	15	27
	November	15	29
	Desember	15	32
TOTAL		90	184

Jumlah dokumentasi yang telah dibuat melalui siaran pers dan foto yang telah dipublikasi di website Kemenko Marves (maritim.go.id) pada tahun 2019 sebanyak 321 publikasi. Tingginya capaian disebabkan karena tim publikasi belum dapat menghitung target jumlah publikasi yang ada di awal periode. Target yang ,menjadi dasar perhitungan realisasi IKP.7 ini adalah dari permintaan pada bulan yang bersangkutan. Sementara realisasi yang didapat adalah berdasarkan pelaksanaan permintaan Menko atau penugasan pimpinan.

IKP.7 ini lebih bersifat output (keluaran) pekerjaan, sehingga direkomendasikan untuk melakukan perubahan indikator kinerja yang lebih bersifat *outcome*, seperti target persentase informasi kemaritiman yang diketahui publik.

IKP.8 Persentase Opini Publik yang Positif

Persentase opini publik yang positif adalah persentase opini masyarakat/publik yang menganggap bahwa kegiatan dan atau capaian kinerja bidang kemaritiman telah dianggap baik, benar atau memberikan dampak yang baik/positif bagi masyarakat dan negara. IKP.8 yang didasarkan pada pemberitaan bidang kemaritiman di media massa (elektronik), dihitung dengan membandingkan berita bidang kemaritiman yang beropini positif dengan total berita bidang kemaritiman.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

emenkomarves
 rves pernah kepo soal suasana konferensi pers
 menkomarves?



© 10, 2019 - Twitter for iPhone

news and people
 Kemenko Bidang Kemaritiman ...
 @kemenkomarves
 The official Twitter Account of
 Coordinating Ministry for Maritime
 and Investment Affairs maritim.go.id

Trends for you

- Trending in Indonesia
Stephanie
 14K Tweets
- Trending in Indonesia
#GerakanBlokirFadrol
 6.027 Tweets
- Trending in Indonesia
#BuwasBuangBeras
 3.814 Tweets
- Trending in Indonesia
#KremasiBandarNarkoba
 6.327 Tweets
- Trending in Indonesia
Indonesia vs Vietnam
 2.922 Tweets

Show more

Terms Privacy policy Cookies Ads info
 More © 2019 Twitter, Inc.

Untuk menghitung IKP.8 ini dilakukan dengan memantau media elektronik kemudian melakukan analisa terhadap muatan pemberiaan yang positif, netral atau negatif. Media yang dijadikan basis penilaian (dipantau) adalah media online utama (mainstream) yang mempunyai pembaca dalam jumlah besar. Berdasarkan capaian selama TA. 2019, capaian pemberitaan positif bidang kemaritiman sebesar 77,99% atau 111,41% dari target (70%).

Pada tahun 2019 terdapat 2650 pemberitaan yang positif dari 3.610 total pemberitaan bidang kemaritiman. Apabila dilihat dari jumlah pemberitaan, maka pemberitaan kemaritiman lebih banyak terdapat pada awal dan akhir tahun. Rincian pemberitaan tersebut adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 16 Rekap Jumlah Opini Pemberitaan Bidang Kemaritiman

No	Bulan	Opini			Total
		Positif	Negatif	Netral	
1	Januari	376	0	182	558
2	Februari	376	0	182	558
3	Maret	376	0	182	558
4	April	70	6	2	78
5	Mei	104	5	8	117
6	Juni	230	1	16	247
TOTAL		1532	12	573	2117

No	Bulan	Opini			Total
		Positif	Negatif	Netral	
7	Juli	154	10	40	164
8	Agustus	183	16	85	284
9	September	173	11	46	230
10	Oktober	158	12	50	220
11	November	236	20	62	318
12	Desember	217	15	45	277
TOTAL		1121	84	288	1493

Dalam pemantauan berita dan media massa yang dijadikan obyek masih bersifat subyektif atau kemampuan pelaksana pemantauan dalam menemukan berita dan menilai. Untuk itu disarankan agar selanjutnya bisa menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, sehingga lebih banyak media dan pemberitaan yang terpantau, serta lebih valid/objektif dalam penilaiannya.

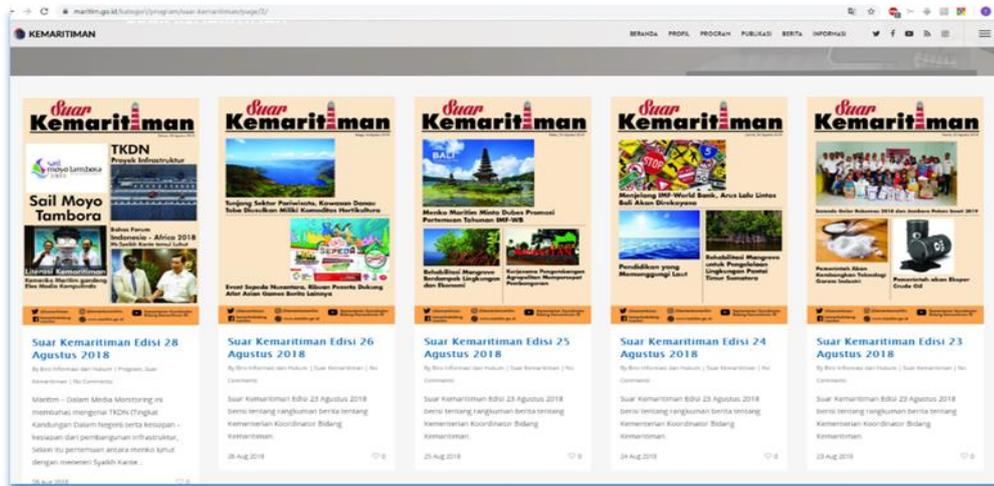
Sebagai salah satu metode untuk menyimpan dan mengumpulkan hasil monitoring opini publik, bahan manajemen opini publik diberi nama 'Suar Kemaritiman' dapat diakses melalui kanal <https://maritim.go.id/kategori/program/suar-kemaritiman/>.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Gambar 5 Suar Maritim



IKP.9 Persentase Layanan Dokumentasi



IKP.9 disusun dan ditargetkan dengan tujuan untuk mengukur capaian layanan dokumentasi kegiatan di lingkup Kemenko Kemaritiman (peliputan kegiatan pimpinan, baik Menteri, maupun kegiatan sekretariat atau kedeputan). Pada TA. 2019 ini, Setmenko berhasil merealisasikan target IKP.9 ini sebesar

120% (nilai maksimal) dari target.

Rincian pendokumentasian yang menjadi dasar penghitungan capaian IKP.9 ini adalah kegiatan reportase dan pendampingan kunjungan kerja Menko Marves, Sekretaris Kemenko, Deputi, dan Staf Ahli Menteri, serta Siaran Pers Kementerian.

Selama tahun 2019 terdapat 353 dokumentasi kegiatan Kemenko Marves yang sudah dibuat dari target 180 kali. Sehingga IKP.9 berhasil merealisasikan capaian maksimal 120%. Rincian pemberitaan tersebut adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 17 Persentase Layanan Dokumentasi Bidang Marves TA. 2019

No	Bulan	Target/ Permintaan	Realisasi	No	Bulan	Target/ Permintaan	Realisasi
1	Januari	15	37	7	Juli	15	51
2	Februari	15	40	8	Agustus	15	53
3	Maret	15	15	9	September	15	17
4	April	15	15	10	Oktober	15	19
5	Mei	15	19	11	November	15	37
6	Juni	15	15	12	Desember	15	35
TOTAL		90	141			90	212



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Rekomendasi untuk IKP. 9 ini sama dengan IPK.7, yaitu: untuk melakukan penetapan target jumlah dokumentasi pada awal tahun anggaran atau triwulan; serta perubahan indikator kinerja yang lebih bersifat *outcome*, seperti kepuasan publik atau internal Kemenko Marves, terhadap kualitas dokumentasi kegiatan kementerian.

3.1.4. Sasaran Program (SP) 4 Tersedianya Layanan Persidangan yang Efektif

Tujuan sasaran program tersedianya layanan persidangan yang efektif adalah mengupayakan tersedianya layanan persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat memberikan kenyamanan bagi peserta rapat koordinasi (persidangan). Sasaran program ini memiliki 1 indikator kinerja (IKP.10) yaitu: **Persentase Kepuasan Layanan Persidangan** dengan target 80% peserta (responden) persidangan puas akan layanan. Indikator ini juga merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2019, sebagai perbaikan penamaan dari IKU pada tahun sebelumnya (tingkat kepuasan layanan persidangan).

Untuk mendapatkan nilai indikator ini dilakukan dengan menggunakan hasil survey yang dilaksanakan dengan sistem *random sampling* pada peserta persidangan yang diadakan oleh Kemenko Kemaritiman, baik di kantor maupun luar kantor Kemenko Kemaritiman.

Responden yang menjadi target adalah pejabat atau staf lintas kementerian, lembaga, Pemda, dan BUMN/perusahaan yang mengikuti rapat koordinasi tingkat Menteri di kantor Kemenko Kemaritiman. Responden diminta untuk memberikan pendapat tentang pengelolaan rakor/persidangan serta diminta untuk memberikan masukan dan saran terhadap pengelolaan rapat koordinasi sebagai bahan untuk peningkatan layanan persidangan.



IKP.10 ditargetkan untuk dinilai semesteran, sehingga dilakukan dua kali penyebaran kuesioner penilaian kepuasan. Pada semester I 2019, presentase kepuasan layanan persidangan (berdasarkan hasil kuesioner) mencapai 87% atau 108,75% dari target yang ditetapkan (80%). Sedangkan pada semester II terealisasi 90% atau 112,50% dari target. Sehingga rerata capaian IKP.10 ini pada tahun 2019 adalah 110,63%.

Nilai capaian ini masih lebih baik dibanding capaian tahun lalu (107,14%), padahal tahun lalu jumlah respondennya lebih sedikit (40 orang) dibanding tahun ini (55 orang). Keberhasilan ini tak terlepas dari penambahan pejabat (kepala sub



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

bagian) dan staf bagian persidangan serta terdapatnya alat Notula sebagai perekaman pelaksanaan persidangan. Walaupun demikian dengan bertambahnya jumlah Deputi (termasuk tugas yang dibebankan) pada Kemenko Marves, maka penambahan staf dan pejabat (kepala sub bagian) tetap diperlukan. Staf yang dapat mengetik steno serta staf yang mempunyai daya analisis untuk menyimpulkan hasil notulensi masih sangat diperlukan.

3.1.5. Sasaran Program (SP) 5 Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi

Sasaran program ini memiliki 3 (tiga) IKP dengan realisasi pada TA. 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Target dan Capaian SP.5 TA. 2019

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	4,29	80	83,24	104,50
2	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum	4,29	80	90	112,50
3	Persentase Pemenuhan SOP Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	4,29	80	78,42	98,03
Nilai Capaian SP.1					117,27

Rincian hasil dan penjelasan capaian SP. 5 adalah sebagai berikut:

IKP.11 Persentase Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Persentase capaian layanan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah fasilitas/layanan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari penyusunan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) dan Keputusan Menteri Koordinator (Kepmenko) yang ditetapkan berbanding dengan jumlah Permenko dan Kepmenko yang diusulkan. Maksud dari layanan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk memberikan fasilitasi/bantuan penyusunan tersedianya peraturan/keputusan Menko agar dapat secepatnya selesai/ditetapkan. Sehingga dapat menjadi pedoman dan menunjang tugas dan fungsi Kemenko Kemaritiman, yang pada akhirnya target kegiatan dan kinerja dapat tercapai

Pada TA. 2019 telah ditetapkan target untuk dapat menghasilkan 20 peraturan/keputusan menteri. Sampai dengan akhir tahun 2019 berhasil direalisasikan 17 Permenko dan 3 Kepmenko. Sehingga realisasi IKP ini adalah 100% atau tercapai 120% (capaian maksimal) dari target (80%).



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Tabel 19 Daftar Peraturan Perundang-undangan

No	Jenis Peraturan	Keterangan
1.	Peraturan Menteri	Penetapan Surat Harmonisasi Kumham Nomor PPE.PP.01.03-182 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
2.	Peraturan Menteri	Penetapan Surat Harmonisasi Kumham Nomor PPE.PP.03.03-425 tanggal 14 Maret 2019 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Kebijakan Akuntansi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
3.	Peraturan Menteri	Ditetapkan tidak memenuhi ketentuan untuk diproses menjadi Peraturan Menteri oleh Kepala Biro Informasi Hukum berdasarkan Nota Dinas Nomor 40/Setmenko.02/Maritim/ND/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 Kemaritiman tentang Pedoman Perumusan, Penetapan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kemaritiman
4.	Peraturan Menteri	Penetapan Surat Harmonisasi Kumham Nomor PPE.PP.01.03-419 tanggal 14 Maret 2019 tentang Buku Putih Diplomasi Maritim
5.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum
6.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 16 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458 tanggal 23 April 2019
7.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Koordinator Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 582 tanggal 21 Mei 2019
8.	Peraturan Menteri	Telah selesai diharmonisasi oleh Tim Harmonisasi 2 Kementerian Hukum dan HAM berikut paraf pembina pada tanggal 23 Juli 2019. Posisi terakhir adalah paraf perbaikan draft Permenko oleh Sesmenko Nomor 248/Maritim tanggal 25 Juli 2019 tentang Tugas dan Tata Kerja Dewan Pengarah, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengarah, serta Tugas, Keanggotaan, dan Tata Kerja Kelompok Ahli Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
9.	Peraturan Menteri	Telah selesai di harmonisasi oleh Tim Harmonisasi 2 Kementerian Hukum dan HAM berikut paraf pembina pada tanggal 23 Juli 2019. Posisi terakhir adalah paraf perbaikan draft Permenko oleh Sesmenko Nomor 249/Maritim tanggal 25 Juli 2019 tentang Tugas dan Tata Kerja Dewan Pengarah, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengarah, serta Tugas, Keanggotaan, dan Tata Kerja Kelompok Ahli Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur;
10.	Peraturan Menteri	Telah selesai di harmonisasi oleh Tim Harmonisasi 2 Kementerian Hukum dan HAM berikut paraf pembina pada tanggal 23 Juli 2019. Posisi terakhir adalah paraf perbaikan draft Permenko oleh Sesmenko Nomor 250/Maritim tanggal 25 Juli 2019 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengarah dan Tata Kerja Kelompok Ahli Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
11.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Koordinator Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 19 November 2019 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Kerja Sama Yang Memiliki Nilai Strategis Tertentu Badan Pelaksana, Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur Dengan Badan Usaha dan Lembaga atau Pihak Terkait Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1485 tanggal 21 November 2019



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

No	Jenis Peraturan	Keterangan
12.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Koordinator Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 19 November 2019 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Kerja Sama Yang Memiliki Nilai Strategis Tertentu Badan Pelaksana, Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba Dengan Badan Usaha dan Lembaga atau Pihak Terkait Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1484 tanggal 21 November 2019
13.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Koordinator Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 19 November 2019 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Kerja Sama Yang Memiliki Nilai Strategis Tertentu Badan Pelaksana, Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores Dengan Badan Usaha dan Lembaga atau Pihak Terkait Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1516 tanggal 27 November 2019
14.	Peraturan Menteri	Selesai Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM melalui penyampaian hasil pengharmonisasian Nomor PPE.PP.01.03-2191 tanggal 17 Desember 2019 Peraturan Menteri tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
15.	Peraturan Menteri	Selesai Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM melalui penyampaian hasil pengharmonisasian Nomor PPE.PP.01.03-2191 tanggal 17 Desember 2019 tentang Peraturan Menteri tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Arsip Dinamis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
16.	Peraturan Menteri	Selesai Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM melalui penyampaian hasil pengharmonisasian Nomor PPE.PP.01.03-2191 tanggal 17 Desember 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
17.	Peraturan Menteri	Selesai Finalisasi Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Nomor Nota Dinas 480/Setmenko.02/MARITIM/ND/XII/2019 hal Paraf Pesetujuan Penandatanganan Naskah Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang kemaritiman tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tanggal 26 Desember 2019
18.	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Koordinator Nomor 81 Tahun 2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemanfaatan Ex Kapal Republik Indonesia TNI- AL (KRI TNI-AL) Menjadi Destinasi Wisata dan Museum
19.	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Koordinator Nomor 84 Tahun 2019 tanggal 23 April 2019 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
20.	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Koordinator Nomor 88 Tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019 tentang Perubahan Panitia Nasional Penyelenggara Sail Nias 2019

IKP.12 Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum

Persentase Capaian Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum adalah fasilitasi/koordinasi pertimbangan dan bantuan hukum yang dibuat atau diberikan oleh tim advokasi Biro Hukum. Maksud dari fasilitasi dan koordinasi pertimbangan dan bantuan hukum adalah sebagai upaya optimalisasi layanan di bidang hukum bagi tercapainya target serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum (litigasi dan non litigasi).

Pada TA. 2019 telah diselesaikan 10 (sepuluh) fasilitasi/koordinasi bantuan hukum. Realisasi IKP ini adalah 100% (seluruh target dapat direalisasikan) atau 120% dari target (70%). Rincian bantuan atau pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

1. Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan PT. Garuda Indonesia tentang Kerja Sama Layanan Korporasi;
2. Nota Kesepahaman Bersama antara Kemenko Kemaritiman dan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, PT. Pelindo I, PT. Pelindo II, PT. Pelindo III, PT. Pelindo IV tentang Implementasi Program Green Port di Pelabuhan;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Keamanan Laut, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa nasional tentang Kerja Sama Pertukaran Data dan Informasi dalam Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Maritim;
4. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Tentara Nasional Indonesia, Badan Informasi Geospasial tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Wisata Bahari;
5. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Perhubungan, KLHK, KKP, Kementerian Pariwisata, TNI, BIG tentang Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim;
6. Telaahan Hukum Surat Permohonan ke-8 Konsultan Hukum dan Advokat Budi Setyo tanggal 1 Juli 2019 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 66/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel yang telah berkekuatan hukum tetap (“inkracht”) dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Sesmenko Nomor B-0842/SESMENKO/MARITIM/HK.04.00/VIII/2019;
7. Telaahan Hukum Surat Direktur Utama PT. Elva Primandiri tentang Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 601 PK/Pdt/2017, dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Plt. Sesmenko Kemaritiman Nomor B1184/SESMENKO/MARITIM/HK.04.00/IX/2019.
8. Telaahan Staf tentang permohonan perlindungan hukum atas nama H. Suwardi Ibrahim kepada Menko Kemaritiman dan Investasi
9. Telaahan Staf tentang Tindak Lanjut Penahanan PNS kemenko Kemaritiman
10. Telaahan Staf tentang pengaduan dan keberatan hukum dan perlindungan hukum atas rencana akuisisi PT. Bank of India/Bank Swadesi Tbk Jakarta oleh pihak ketiga/lembaga keuangan lainnya
11. Asistensi dan monitoring kasus kebocoran minyak dan gas di sumur YYA-1 Blok Offshore Nort West Java (ONWJ) milik PT Pertamina di Laut Jawa sebelah utara Karawang yang berdampak terhadap masyarakat nelayan dan petambak di perairan Serang Utara.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

IKP.13 Persentase Pemenuhan SOP Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Persentase pemenuhan SOP dan tata laksana Kemenko Kemaritiman adalah jumlah tersusunnya SOP tata laksana di lingkup Kemenko Kemaritiman yang diselesaikan/terfasilitasi oleh Biro Informasi dan Hukum berbanding target pemenuhan SOP tata laksana di lingkup Kemenko Kemaritiman. Tujuan IKP.13 ini adalah untuk mengukur ketersediaan SOP dalam pelaksanaan kegiatan di Kemenko Kemaritiman sehingga dapat menjadi pedoman dan menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2019, Biro Hukum selaku penanggung jawab IKP ini berhasil merealisasikan target pemenuhan SOP sebanyak 286 SOP atau terealisasi 100% dari target. Sehingga capaian IPK.13 adalah 120% (capaian maksimal) dari target (80%).

Tabel 20 Rincian Jumlah SOP di Kemenko Marves

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat Kementerian Koordinator	102
	Biro Perencanaan dan Informasi	13
	Biro Hukum	43
	Biro Umum	46
2	Inspektorat	12
3	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	32
4	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	28
5	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	68
6	Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim	49

Capaian pada tahun ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya (111,80%). Perubahan nama unit kerja dari Biro Informasi dan Hukum menjadi Biro Hukum menjadikan fokus kerja dalam penatalaksanaan atau penyusunan SOP menjadi lebih baik dan terstruktur.

3.1.6. Sasaran Program (SP) 6 Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Manusia dan BMN yang Handal

Tujuan dari SP.6 ini adalah adalah jumlah pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan serta tersedianya laporan barang milik negara (BMN) yang akuntabel yang ada dalam lingkungan Kemenko Kemaritiman.

Sasaran program ini memiliki 2 (dua) IKP dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 21 Sasaran Program (SP) 5

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
----	----------	-------	--------	-----------	-------------



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	4,29	50	94,00	120
2	Persentase ketersediaan sarana kerja pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	3,57	80	80,78	100,98
Capaian IKP.5					110,49

Rincian hasil dan penjelasan capaian SP.6 adalah sebagai berikut:

IKU.14 Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan adalah persentase jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan kompetensi manajerial, sosio-kultural dan teknis yang harus dimiliki seorang ASN/pejabat. IKU.12 ini merupakan IKU yang baru ditetapkan pada tahun 2019. Kompetensi jabatan diukur dengan menghitung jumlah pegawai yang sudah memenuhi kompetensi dasar yang dibutuhkan, yang meliputi *soft competency* (kompetensi personal/bakat), *hard competency* (kompetensi keahlian/teknis) dan *attitude* (sosio-kultural atau perilaku). Dalam penghitungan IKU.12 ini penilaian kompetensi hanya pada dua indikator, yaitu kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Penilaian kompetensi teknis tidak dilakukan, karena setelah standar kompetensi belum ditetapkan.

Tabel 22 Rekap Hasil Penilaian Kompetensi Pejabat

No	Jabatan	Sudah Assesment	Memenuhi Syarat	Cukup Memenuhi Syarat	Belum Memenuhi Syarat	Persentase Yang Memenuhi Syarat
1	2	3	4	5	6	$7 = (4+5)/(4+5+6)$
1	JPT Pratama	23	10	7	6	74%
2	Administrator	61	51	10	0	100%
3	Pengawas	38	25	12	1	97%
Total		122	86	29	7	94%

Saat ini jumlah pejabat yang telah dilakukan asesmen dan dinyatakan sesuai dengan kompetensi personal/bakat dan kompetensi perilaku adalah 94% dari 122 pejabat yang ada atau sebanyak 109 orang. Dari jumlah pejabat yang sudah dilakukan uji kompetensi masih terdapat 6 pejabat yang belum memenuhi syarat kompetensi yang diperlukan. Selain itu masih terdapat 17 pejabat yang belum dilakukan uji kompetensi.

Dapat disampaikan bahwa dalam pemenuhan kompetensi pegawai yang baik di lingkup Kemenko Kemaritiman mengalami beberapa kendala, yaitu:

1. Dalam penyelenggaraan atau pengiriman pegawai untuk melaksanakan diklat mengalami kendala karena keterbatasan kursi/kesempatan diklat pada lembaga diklat yang dianggap membantu pelaksanaan diklat;



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

2. Kesibukan dari pada pejabat/pegawai dimasing-masing unit untuk dapat dikirim/melaksanakan diklat (fungsional/kepemimpinan);
3. Belum ada kesepakatan dengan instansi lain (kementerian/lembaga teknis) dalam cara/model pengembangan kompetensi (untuk program magang, diklat teknis, *in the job training*);
4. PNS yang masuk dalam Kemenko Kemaritiman belum sesuai kebutuhan.

Penyusunan dan pelaksanaan standar kompetensi pegawai Kemenko Kemaritiman belum selesai (final dilakukan). Namun beberapa capaian dalam menunjang capaian IKP ini telah dilakukan, yaitu diantaranya telah disusun/dilaksanakan:

1. indikator faktor jabatan
2. evaluasi kinerja/jabatan
3. analisis jabatan dan analisis beban kerja
4. analisa jabatan fungsional
5. seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama.

Kemenko Marves, telah merencanakan beberapa hal dalam meningkatkan kompetensi pegawainya, yaitu:

1. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan (diklat) baik diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis;
2. Memberikan kesempatan magang pegawai, baik di lingkungan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat;
3. *In the job training*;
4. Seminar, *workshop*, lokakarya dan lain-lain;
5. penyusunan *database* kepegawaian, *roadmap* kepegawaian (termasuk perencanaan diklat, kursus, pengisian jabatan (administrator, pengawas dan jabatan fungsional);
6. Penataan administrasi kepegawaian, termasuk penempatan pegawai sesuai Sk dan keahliannya.

IKP.15 Persentase Pemenuhan Sarana Kerja Sesuai Standar Kebutuhan Pegawai Kemenko Kemaritiman

Persentase ketersediaan sarana kerja pegawai Kemenko Kemaritiman adalah perbandingan jumlah sarana kerja yang tersedia dibandingkan dengan standar kebutuhan (pegawai) yang ditetapkan. Tujuan indikator kinerja ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan/penggunaan BMN yang handal dan dapat menunjang/membantu pegawai lingkup Kemenko Kemaritiman dalam pencapaian target kegiatan dan kinerja kementerian.

Pada TA. 2019, IKP.15 ini memiliki memiliki target sebesar 80%, lebih rendah dari target tahun 2018 (95%). Penurunan target ini disebabkan masuknya 107 CPNS baru pada tahun 2019. Sementara anggaran belanja modal mengalami penurunan



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

21,54%, dari Rp 17.501.416.000,- pada tahun 2018 menjadi Rp 13.731.721.000,- pada tahun 2019.

Dari total jumlah pegawai Kemenko Kemaritiman sampai dengan akhir 2019 sebanyak 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) orang (PNS, staf khusus, tenaga ahli, dan tenaga kontrak/administrasi) telah dapat dipenuhi sarana dan prasarana kerja dan operasional kantor sebesar 80,78%, sehingga nilai capaian IKP ini adalah 100,98% dari target yang ditetapkan.

Tabel 23 Sarana dan Prasarana Kemenko Marves TA. 2019

No	Sub indikator Kinerja		Jumlah		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Ruang kerja yang sesuai dan layak		314	314	100,00
2	Kendaraan dinas	Mobil	127	24	18,90
		Sepeda motor	19	19	100,00
3	Lemari-Bufet		240	84	29
4	Komputer		432	221	35
5	Laptop/Notebook		270	74	51,16
6	Printer		281	134	27,41
7	Scanner		33	51	154,55
8	Proyektor		46	34	73,91
9	Mesin Fotocopy		15	27	180
10	Telepon		166	166	100
Persentase Rerata Total					80,78

Jika dihitung berdasarkan capaian IKP.14 (berbanding target), maka pada TA. 2019 meningkat sebesar 3,7% jika dibandingkan capaian tahun 2018 (97,38%). Namun jika dibandingkan dengan kondisi (realisasi) maka realisasi tahun 2019 (80,78%) lebih rendah 9,24% dibanding tahun 2018 (90,02%). Penurunan ini selain disebabkan bertambahnya CPNS yang banyak belum diberikan fasilitas (terutama komputer dan printer), juga dikarenakan kebijakan untuk menghentikan penyewaan kendaraan dinas/operasional bagi pejabat eselon III.

Tabel 24 Capaian Persentase Sarana dan Prasarana TA. 2018

No	Sub indikator Kinerja		Target	Realisasi	Persentase
1	Ruang kerja yang sesuai dan layak		549	549	100,00
2	Kendaraan dinas	Mobil	102	132,35	135,25
		Sepeda motor	50	38,00	38
3	Lemari-Bufet		150	232	154,67
4	Komputer		400	306	76,50
5	Laptop/Notebook		400	170	42,50
6	Printer		200	177	88,50



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

No	Sub indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
7	Scanner	50	23	46,00
8	Proyektor	15	19	126,67
9	Mesin Fotocopy	15	12	80,00
10	Telepon	200	210	105,00
Rerata Capaian Total				90,02

Berdasarkan capaian tersebut di atas maka beberapa rekomendasi untuk perbaikan capaian kinerja ke depan antara lain adalah:

1. jika kebijakan eselon III tidak mendapatkan kendaraan roda empat dipermanenkan, maka perlu dipertimbangkan dalam menyusun target BMN, agar capaian kinerja dapat ditingkatkan
2. perlu segera disusun pedoman standar kebutuhan sarana-prasarana pegawai
3. perlu menyusun standar pengelolaan BMN termasuk pemeliharaannya, seperti standar penggunaan kendaraan dinas, standar pemeliharaan alat-alat elektronik dan peralatan lainnya
4. penetapan anggaran pemeliharaan dan perbaikan yang lebih sesuai kebutuhan
5. merekrut tenaga untuk pemeliharaan BMN yang sesuai (kapabel)

3.1.7. Sasaran Program (SP) 7

Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang Akurat

Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat adalah terlaksananya sistem perencanaan dan pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran yang akuntabel. Sasaran Program (SP.6) ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 25 Sasaran Program (SP) 6

No	Nama IKU	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	5,71	100	95,80	95,80
2	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran	4,29	90	94,31	104,79
3	Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja	4,29	90	92,49	102,77
Capaian SP.6					101,12

IKP.16 Persentase Penerapan SAKIP di Kemenko Kemaritiman

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur persentase penerapan SAKIP (prinsip-



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

prinsip dan seluruh kewajiban yang menyertai SAKIP dilaksanakan) di Kemenko Kemaritiman.

Pelaksanaan kegiatan implementasi SAKIP dilaksanakan sebagai implementasi ketentuan berikut ini:

1. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
2. Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Pasal 27 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Penilaian pelaksanaan SAKIP meliputi: perencanaan kinerja, perjanjian kinerja pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi dan reviu kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian dilakukan inventarisasi rincian SAKIP yang telah dilaksanakan, kemudian dilakukan perhitungan dengan membandingkan rincian SAKIP yang dilaksanakan dengan kewajiban yang harusnya ada.

Dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tidak disebutkan secara jelas kewajiban unit Eselon II yang bukan satuan kerja (Eselon II di lingkungan Kemenko Kemaritiman bukan satuan kerja mandiri) untuk menerapkan SAKIP. Namun sesuai dengan hasil rekomendasi tim penilai dari KemenaPANRB, agar entitas/unit kerja yang menerapkan SAKIP di lingkungan Kemenko Kemaritiman dapat sampai level Eselon II. Untuk itu, sejak triwulan III penilaian penerapan SAKIP di lingkup Kemenko Kemaritiman dilaksanakan.

Secara garis besar, seluruh unit Eselon 1 di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah menerapkan SAKIP sejak TA. 2018. Hanya saja tidak seluruh unsur yang diwajibkan dalam penerapan SAKIP sudah dilaksanakan, yaitu dalam penyusunan laporan kinerja tingkat eselon II. Masih terdapat beberapa eselon II yang belum menyusun laporan kinerja interim/triwulan.

Berdasarkan hasil evaluasi, maka secara total realisasi implementasi SAKIP di Kemenko Kemaritiman adalah 95,80%. Sehingga capaian IKP.16 ini adalah 95,80% dari target yang telah ditetapkan.

Pengumpulan dokumen SAKIP tersebut (untuk tingkat Kementerian dan eselon I) juga telah diunggah dalam sistem E-SAKIP Reviu (sistem aplikasi yang dibangun oleh KemenPANRB) sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (98,24), capaian ini memang lebih rendah, namun masih lebih baik dibanding capaian tahun 2017 (91%). Penurunan capaian dibanding tahun lalu disebabkan karena perluasan unit kerja yang dievaluasi, yaitu sejak triwulan III TA. 2019 juga menghitung implementasi SAKIP di level eselon II.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Tabel 26 Rincian Capaian Pelaksanaan SAKIP TA. 2019

No	Komponen	Unit					
		Kemenko	Setmenko	Dep 1	Dep 2	Dep 3	Dep 4
1	Renstra 2015 - 2019	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Renstra 2015 – 2019 Eselon II		100%	100%	100%	100%	50%
3	Renja 2019	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Renja 2019 Eselon II		100%	100%	100%	100%	100%
5	DIPA/RKA-KL 2019	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Perjanjian Kinerja Menteri	100%					
7	Perjanjian Kinerja Eselon I		100%	100%	100%	100%	100%
8	Perjanjian Kinerja Eselon II		100%	100%	100%	100%	100%
9	Perjanjian Kinerja Eselon III		100%	100%	100%	100%	100%
10	Perjanjian Kinerja Eselon IV		100%	100%	100%	100%	100%
11	Pengelolaan Data Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Laporan Kinerja Tahun 2018	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Laporan Kinerja Interim Triwulan I 2019	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Laporan Kinerja Interim Triwulan II 2019	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Laporan Kinerja Interim Triwulan III 2019		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	80%
16	Renja 2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Renja 2020 Eselon II		100%	100%	100%	100%	100%
,	DIPA/RKA-KL 2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rerata	100%	94,79%	94,79%	94,79%	94,79%	95,63%
	Capaian SAKIP Kementerian	95,80%					

Dengan perubahan organisasi kementerian dan penambahan unit kerja, maka implementasi SAKIP perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan lagi seperti yang dilakukan pada awal-awal kementerian ini dibentuk (2015). Untuk itu jika jumlah staf belum memadai, maka direkomendasikan dalam pelaksanaan SAKIP dapat melibatkan tenaga ahli atau konsultan dari pihak eksternal (akademisi atau lembaga swasta).

IKP.17 Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Persentase kinerja pelaksanaan anggaran adalah Nilai dari Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang secara kuantitatif mengukur kinerja dan



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

kualitas pelaksanaan anggaran secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek akuntabilitas pada saat pelaksanaan anggaran. IKPA adalah suatu indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Untuk lingkup Setmenko Kemaritiman, IKPA ini merupakan indikator yang baru ditetapkan tahun 2018. Penghitungan capaian indikator ini adalah menggunakan hasil penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kemenkeu. IKPA ini ditargetkan setiap triwulan, dengan target pada akhir tahun 2019 adalah 90.

Indikator kinerja ini merupakan hasil penilaian yang meliputi 12 (dua belas) komponen dengan cara penghitungan masing-masing indikator adalah mengkalkulasi setiap indikator dengan bobot masing-masing yang telah ditentukan. Hasil perhitungan nilai IKPA Kemenko Kemaritiman adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA. 2019

No	Indikator	Nilai bobot (%)			Nilai akhir		
		2018	2019	Selisih	2018	2019	Selisih
1	Pengelolaan Uang Persediaan	88,00	100,00	12,00	8,80	10,00	1,20
2	Data Kontrak	80,00	85,00	5,00	8,00	12,75	4,75
3	Kesalahan Surat Perintah Membayar	94,63	90,00	-4,63	4,73	5,40	0,67
4	Retur SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)	99,86	99,90	0,04	4,99	5,99	1,00
5	Halaman III DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)	70,28	53,85	-16,43	3,51	2,69	-0,92
6	Revisi DIPA	100,00	100,00	0,00	5,00	5,00	0,00
7	Penyelesaian Tagihan	93,14	96,53	3,39	18,63	14,48	-4,15
8	Rekon Laporan Pertanggungjawaban	92,00	100,00	8,00	0,00	5,00	0,00
9	Rencana Kas/Penarikan Dana	91,67	100,00	8,33	4,58	5,00	0,42
10	Realisasi	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00	0,00
11	Pagu Minus	99,98	99,81	-0,17	5,00	3,99	-1,01
12	Dispensasi SPM	100,00	100,00	0,00	4,00	4,00	0,00
Nilai IKPA Total					92,82	94,31	1,49

Pada akhir TA. 2019, nilai IKPA Kemenko Kemaritiman lebih baik dari tahun 2018. Pada grafik dalam gambar 6 di bawah ini terlihat nilai IKPA pada TA. 2019 cenderung meningkat, kecuali pada bulan April, Juli, dan Oktober. Apabila



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

dibandingkan dengan target (90), IKP.17 adalah 104,79% (dihitung dari nilai IKPA pada akhir TA. 2019).

Gambar 6 Grafik Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA. 2019



Gambar 7 Grafik Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA. 2018



Dari kedua grafik diatas, terlihat bahwa nilai IKPA pada tahun 2019 lebih stabil pergerakan (kenaikannya) dibanding pada tahun 2018.

Beberapa hal yang berperan dalam keberhasilan pencapaian target nilai IKPA yang baik adalah:

1. Adanya peningkatan kedisiplinan dan ketertiban dalam pengelolaan anggaran;
2. Peningkatan kemampuan pelaksanaan anggaran dari masing-masing unit kerja di lingkup Kemenko Kemaritiman;
3. Adanya dukungan dan komitmen dari semua level pimpinan;
4. Penyusun jumlah pengajuan penggunaan anggaran yang dibutuhkan secara proporsional sesuai kemampuan penggunaannya dan akuntabel.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Selain itu beberapa program yang turut mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian target kinerja ini:

1. Program meningkatkan kapasitas pengelola keuangan melalui kegiatan berupa sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat;
2. Program konsultasi dan bimbingan dari Kementerian Keuangan selaku lembaga yang berwenang melakukan penilaian terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
3. Memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu atau sebagai *tools* dalam penyelesaian pekerjaan.

IKP.18 Persentase Konsistensi Perencanaan terhadap Pelaksanaan Kinerja

IKP.18 ini dapat didefinisikan sebagai konsistensi rancangan program dan anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terakhir terhadap awal rencana/rancangan program dan anggaran yang telah disusun pada tahun sebelumnya (DIPA awal). Indikator ini ditargetkan pada akhir semester I dan akhir TA. 2019. Indikator ini merupakan indikator yang baru ditetapkan tahun 2018.

Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja adalah persentase atau jumlah nilai (pagu) anggaran rencana pada DIPA akhir dibandingkan rencana pada DIPA awal. Tujuan indikator kinerja ini adalah untuk mengetahui konsistensi unit kerja dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/kinerja, sehingga masing-masing unit kerja dalam merencanakan kegiatan dan anggarannya lebih tertata/terencana. Formula mengukur persentase inkonsistensi adalah dengan menghitung persentase konsistensi dari jumlah anggaran yang tetap pada tiap-tiap keluaran kegiatan (*output*). Untuk menghitung konsistensi itu terlebih dahulu menghitung perbedaan (Δ) jumlah anggaran pada masing-masing keluaran, dengan rumus sebagai berikut:

$$\Delta = \frac{\text{Jumlah Anggaran Akhir Tahun} - \text{Jumlah Anggaran Awal Tahun}}{\text{Jumlah Anggaran Awal Tahun}} \times 100\%$$

Setelah nilai perbedaan anggaran diketahui kemudian menghitung anggaran yang tetap (konsisten) dengan rumus: $100\% - \Delta$.

Beberapa hal yang masih perlu diperhatikan dalam penyampaian laporan ini adalah tingkat konsistensi perencanaan per kegiatan terutama yang berkaitan dengan target kinerja. Diharapkan dengan semakin baik kualitas perencanaan maka konsistensi perencanaan akan semakin konsisten.

Dari perhitungan tersebut, didapat nilai konsistensi sebesar 96,38% pada semester 1, dan 88,59% pada semester 2. Dalam penghitungan capaian IKP ini dilakukan perhitungan rerata dari hasil pada 2 semester tersebut, sehingga nilai capaian (rerata) IKP.18 pada tahun 2019 ini adalah 92,49%.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Tabel 28 Kode dan Nama Keluaran (Output) Kemenko Kemaritiman TA. 2019

Kode	Uraian	Semester I	Semester II
5601	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	0	5,49
5602	Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Kerja Sama, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	0	10,96
5603	Pengelolaan Informasi, Persidangan, Kehumasan, Administrasi Hukum dan Organisasi	0	17,70
5604	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	0	3,45
5748	Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional	0	
5605	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim	11%	4,73
5749	Koordinasi Kemanan dan Ketahanan Maritim	17,60%	11,97
5750	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim	49,13%	42,58
5751	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim	45,21%	129,61
5752	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	39,93%	39,93
5606	Koordinasi Sumber Daya Hayati	0	3,96
5753	Koordinasi Sumber Daya Mineral Energi dan Nonkonvensional	0	3,96
5754	Koordinasi Jasa Kemaritiman	0	3,96
5755	Koordinasi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim	0	3,96
5756	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa	0	4,44
5607	Koordinasi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik	0	8,21
5757	Koordinasi Infrastruktur Pertambangan dan Energi	0	2,35
5758	Koordinasi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata	0	2,35
5759	Koordinasi Industri Penunjang Infrastruktur	0	8,21
5760	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur	0	0,13
5608	Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Maritim	0	38,90
5761	Koordinasi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim	0	4,17
5762	Koordinasi Budaya, Seni dan Olah Raga Bahari	0	3,41
5763	Koordinasi Jejaring Inovasi Maritim	0	2,50
5764	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim	0	3,61
Rerata Perubahan Anggaran Kementerian		3,62%	11,41%
Rerata Konsistensi Anggaran Kementerian		96,38%	88,59%



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Di dalam dokumen perencanaan telah ditetapkan target kinerja dan besaran anggaran yang dibutuhkan. Unit kerja dalam melaksanakan program/kegiatan harus berpedoman pada dokumen perencanaan. Namun seringkali karena berbagai kondisi dan kebutuhan, baik eksternal maupun internal, rencana yang sudah dibuat harus berubah. Mekanisme untuk dapat membiayai kegiatan baru atau yang tidak direncanakan adalah melalui revisi anggaran.

Dibandingkan dengan capaian semester I, capaian semester II mengalami penurunan. Kondisi ini terutama disebabkan oleh kebijakan pimpinan terutama pada:

1. pergeseran anggaran untuk penambahan tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp 14.124.959.000,- yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran antar output dari semua unit kerja pada Belanja Barang (52) ke Belanja Pegawai (51);
2. revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran untuk penambahan pagu anggaran pada output Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Maritim (5608) sebesar Rp 3.037.000.000,- dari dana BA BUN (BA.999.08) Kementerian Keuangan untuk Pembiayaan Kegiatan Sekretariat Satgas Citarum;
3. revisi anggaran untuk penambahan pagu anggaran pada output Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim (5751) sebesar Rp 2.840.000.000,- dari dana BA BUN (BA.999.08) Kementerian Keuangan untuk Dukungan Pendanaan Bagi Pembentukan Commencement Fund Sekretariat AIS Forum Tahun 2019.

3.1.8. Sasaran Program (SP) 8

Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Maksud dari SP.8 ini adalah tersedianya dokumen pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan, sehingga adanya panduan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta terciptanya efisiensi dan efektivitas pelayanan di Kemenko Kemaritiman. SP.8 ini hanya memiliki satu indikator kinerja, yaitu IKP.19: **Jumlah Kebijakan/Rancangan Kebijakan Manajerial yang Dihasilkan.**

Pada tahun 2019 jumlah dokumen dan/atau rancangan yang ditargetkan diselesaikan adalah 13 buah dokumen, dan telah tercapai 100% sesuai target. Rancangan/dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja (Renja) Kemenko Kemaritiman TA. 2019,
2. Kepmenko tentang Penetapan Program Prioritas dan Quick Win Kemenko Kemaritiman Tahun 2019,
3. Draft Pedoman Umum Perencanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kemenko Kemaritiman,
4. Draft Pedoman Penyusunan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman,



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

5. Surat Edaran Sesmenko tentang Tata Cara Revisi Anggaran di Lingkungan Kemenko Kemaritiman,
6. Rancangan Permenko tentang Pedoman Pengelolaan Pengamanan dan Ketertiban lingkup Kemenko Kemaritiman,
7. Rancangan Permenko tentang Kebijakan Akuntansi Kemenko Kemaritiman,
8. Rancangan Permenko tentang Pedoman Keprotokolan di lingkungan Kemenko Kemaritiman,
9. Rancangan Permenko tentang Pedoman Perencanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kemenko Kemaritiman,
10. Rancangan Permenko tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas lingkup Kemenko Kemaritiman,
11. Dokumen pengajuan revisi anggaran TA. 2019,
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2020,
13. Rancangan Teknokratik Rencana Srategis Kemenko Kemaritiman 2020-2024.

IP.19 ini merupakan indikator yang baru ditetapkan TA. 2019, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Sebagian dokumen di atas masih berupa rancangan atau draft, kecuali nomer 1, 2, 5, 11, dan 12. Untuk itu pada tahun 2020 ini delapan draft/rancangan tersebut harus segera ditetapkan melalui keputusan atau peraturan pejabat yang terkait. Sehingga bisa menjadi pedoman yang tidak dapat dielakan/dihindari oleh para pejabat/staf di lingkup Kemenko Kemaritiman. Selain penetapannya, implementasi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pedoman tersebut perlu dilakukan dengan baik dan benar. Penerapan pedoman dengan baik dan konsisten akan berdampak pada pelayanan dan pencapaian target/ouput dari masing-masing pedoman tersebut.

3.1.9. Sasaran Program (SP) 9

Organisasi dan Tata Kelola yang Baik di Sekretariat Kementerian Koordinator

Penerapan organisasi dan tata kelola yang baik di Setmenko Kemaritiman adalah dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan di Setmenko Kemaritiman. SP.9 hanya memiliki satu indikator (IKP.20): Nilai Evaluasi AKIP Setmenko Kemaritiman. IKP.20 ini hanya ditargetkan sekali dalam satu tahun anggaran.

Nilai Evaluasi AKIP Setmenko Kemaritiman adalah nilai evaluasi tentang pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Setmenko Kemaritiman. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Tabel 29 Hasil penilaian pelaksanaan SAKIP di lingkup Setmenko

No	Komponen	2017		2018	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan kinerja	45	33,25	30	18,42
2.	Pengukuran kinerja	35	21,75	25	18,13
3.	Pelaporan kinerja	20	18,00	15	11,45
4.				10	3,25
5.				20	13,12
Nilai Hasil Evaluasi		100	73,00	100	64,37
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		B	

Berdasarkan hasil evaluasi APIP Kemenko Kemaritiman, capaian IKP.20 ini adalah 64,37% atau 95,98% dari target. Pada tabel 28 di atas terlihat bahwa capaian nilai AKIP Setmenko Kemaritiman mengalami penurunan, Hal ini terjadi disebabkan karena beberapa hal/faktor, yaitu:

1. bertambahnya komponen penilaian dari 3 indikator menjadi 5 indikator,
2. belum disusun Renstra Setmenko sesuai dengan Renstra Kemenko Kemaritiman hasil revisi tahun 2018,
3. target kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya didasarkan pada basis data dan argument yang logis karena target pada setiap tahun belum mempunyai penjelasan dasar perhitungan,
4. rencana Aksi untuk mendukung rencana kinerja tahunan belum dibuat,
5. capaian target kinerja belum dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan
6. ukuran (indikator) kinerja individu belum sepenuhnya mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya dan hasil pengukuran (capaian) kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward & punishment*,
7. informasi dalam Laporan Kinerja yang disajikan belum digunakan untuk perbaikan perencanaan serta peningkatan kinerja secara optimal.

Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja untuk meningkatkan nilai AKIP Setmenko, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja:
 - a. melakukan rewiuw Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Renstra Kementerian yang telah direviu
 - b. perbaikan indikator pada Perjanjian Kinerja
 - c. mengunggah hasil renstra, dan rewiu pada laman (*website*) Kemenko untuk memberikan kemudahan publik dalam mengakses dokumen tersebut,
 - d. memperbaiki target kinerja agar memenuhi kriteria target kinerja yang baik,



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

- e. Menyusun rencana aksi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja, dan
 - f. Menggunakan capaian target kinerja sebagai dasar untuk memberikan penghargaan (*reward*).
2. Komponen Pengukuran Kinerja: menetapkan ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya, serta menggunakan hasil capaian kinerja pejabat/staf sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
 3. Komponen Pelaporan Kinerja:
 - a. Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dengan besaran yang dapat dikuantifikasikan pada Laporan Kinerja, dan
 - b. Menggunakan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja untuk perbaikan perencanaan.
 4. Komponen Evaluasi Internal:

Melaksanakan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
 5. Komponen Pencapaian Kinerja:
 - a. Meningkatkan capaian kinerja tahun berjalan agar lebih baik dari tahun sebelumnya.
 - b. Meningkatkan pencapaian indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) agar mencapai sasaran/kinerja organisasi.

3.1.10. Sasaran Program (SP) 10 Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator

Sasaran strategis pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Sekretariat Kementerian Koordinator adalah terselenggaranya sistem perencanaan dan penggunaan anggaran yang sesuai ketentuan, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. SP.10 memiliki 1 (satu) indikator yaitu IKP.21: **Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP atas Laporan Keuangan dan BMN.**

Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah rekomendasi tentang temuan bidang keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (APIP) yang ditindaklanjuti (dilaksanakan) oleh Biro Umum (selaku penanggungjawab proses pengadministrasian keuangan). Indikator kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil revidi atas Laporan Keuangan tahun 2018 menjadi relevan karena sejalan dengan sasaran “Terselenggaranya Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman”.

IKP.21 ini ditargetkan pada triwulan I dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target. Berdasarkan hasil revidi Laporan Keuangan tahun 2018, terdapat 76



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pengelola keuangan di lingkungan Kemenko Kemaritiman. Dari 76 buah rekomendasi hasil reuiu atas tersebut telah ditindaklanjuti semuanya. Dengan demikian realisasi persentase tindak lanjut atas hasil reuiu atas laporan kinerja mencapai sebesar 100%.

Capaian pada tahun 2019 ini sedikit lebih baik dari capaian tahun 2018 (97,96%). Perbaikan capaian ini disebabkan karena semakin banyaknya staf di Kemenko Kemaritiman serta komitmen pimpinan untuk menyelesaikan rekomendasi dari APIP.

3.2. Capaian Realisasi Keuangan

Pada tahun 2019 walaupun telah terjadi perubahan nama dari Kemenko Kemaritiman menjadi Kemenko Marves, namun dalam sisi keuangan/penganggaran belum dilakukan perubahan (tidak ada DIPA baru atau keluaran/output baru). Sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan masih menggunakan anggaran dan kode DIPA Kemenko Kemaritiman.

Nilai capaian kinerja realisasi keuangan pada tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 30 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman TA. 2019

Kode	Program	Pagu	Realisasi	%
5601	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran Serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Biro Umum)	137.186.435.000	133.684.810.715	97,45
5602	Penyusunan Program, Anggaran, Persidangan, Akuntabilitas Kinerja, Hubungan Masyarakat (Biro Perencanaan)	14.706.894.000	9.754.983.693	96,61
5603	Perancang Peraturan, Kerjasama, Tata Laksana Organisasi, Advokasi Hukum (Biro Hukum)	6.762.929.000	11.043.359.868	97,11
5604	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Inspektorat)	3.379.234.000	3.308.958.109	97,92
5748	Rekomendasi Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman (Staf Ahli Menteri)	1.570.717.000	1.432.402.896	91,19
Total		163.606.209.000	159.224.515.281	97,32

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa unit kerja eselon II pada Setmenko Kemaritiman dengan persentase realisasi tertinggi sesuai dengan pagu anggaran terbesar adalah pada unit kerja Biro Umum (5601) sebesar 97,45%. Sementara unit kerja dengan persentase realisasi terkecil sesuai dengan pagu terendah adalah unit Staf Ahli Menteri (5748) yang sebesar 91,19%. Staf Ahli Menteri walaupun merupakan eselon I, pada operasional kegiatan masuk dalam tanggung jawab anggaran di Biro Umum pada Bagian Protokol. Realisasi di Staf Ahli Menteri terhitung rendah dari target anggaran untuk 4 orang Staf Ahli Menteri,



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

baru terisi 2 Staf Ahli Menteri. Kedua Staf Ahli Menteri pada tahun 2019 juga melaksanakan tugas 2 Staf Ahli Menteri yang belum terisi.

Secara total, persentase realisasi Setmenko Kemaritiman pada TA. 2019 adalah 97,32%, Nilai ini lebih tinggi 4,3% dari realisasi TA. 2018 dan 10,98% dari realisasi TA. 2018. Perbaikan realisasi ini terjadi karena semakin lengkapnya pejabat dan staf yang bertambah. Selain itu kemampuan mengelola anggaran para staf pengelola keuangan juga semakin baik. Nilai realisasi keuangan ini juga lebih baik dari target yang ditetapkan (95%).

Tabel 31 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman TA. 2018 per Unit Kerja

Kode MAK	Program	Pagu	Realisasi	Persentase
5601	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran Serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Roum)	137.106.391.000	131.342.921.597	95,80%
5602	Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Kerja Sama, Akuntabilitas Kinerja, dan Reformasi Birokrasi (Roren)	19.525.312.000	14.202.303.665	72,74%
5603	Pengelolaan Informasi, Persidangan, Kehumasan, Administrasi dan Hukum Organisasi (BIH)	15.186.000.000	14.697.803.069	96,79%
5604	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Inspektorat)	3.500.000.000	3.156.559.996	90,19%
5748	Rekomendasi Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman (Staf Ahli)	1.800.000.000	1.361.576.639	75,64%
Total		177.117.703.000	164.761.164.966	93,02%

Adapun rincian realisasi keuangan Setmenko Kemaritiman Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32 Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman TA. 2019 per Keluaran

Kode	Program	Pagu	Realisasi	%
5601.951	Layanan Internal (Overhead)	13.421.721.000	13.074.391.393	97,41
5601.954	Layanan Manajemen SDM	4.865.655.000	4.623.935.940	95,03
5601.955	Layanan Manajemen Keuangan	4.249.995.000	4.112.632.227	96,77
5601.956	Layanan Manajemen BMN	396.870.000	338.262.140	85,23
5601.959	Layanan Protokoler	22.691.538.000	21.407.405.954	94,34
5601.962	Layanan Umum	1.776.350.000	1.748.946.932	98,46
5601.994	Layanan Perkantoran	89.784.306.000	88.379.236.129	98,44
5602.001	Layanan Pengelolaan Kerjasama	2.595.172.000	2.441.270.920	94,07
5602.952	Layanan Perencanaan	2.915.905.000	2.880.848.026	98,80
5602.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.808.731.000	1.709.198.700	94,50
5602.961	Layanan Reformasi Birokrasi	2.777.714.000	2.724.266.0470	98,08
5603.001	Layanan Persidangan	999.174.000	988.950.667	98,98
5603.957	Layanan Hukum	2.523.920.000	2.432.201.813	96,37
5603.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	3.736.835.000	3.578.577.642	95,76



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Kode	Program	Pagu	Realisasi	%
5603.963	Layanan Data dan Informasi	4.112.372.000	4.042.879.746	98,31
5604.001	Layanan Audit Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	3.379.234.000	3.309.108.109	97,92
5748.001	Rekomendasi Penguatan dan Penataan Regulasi dan kelembagaan Kemaritiman	1.570.717.000	1.432.402.896	91,19
Jumlah		163.606.209.000	159.224.515.281	97,32

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat persentase realisasi tertinggi adalah keluaran Layanan Persidangan (98,98%). Sementara Layanan Manajemen BMN memiliki nilai realisasi terendah (85,23%). Pada dasarnya layanan persidangan ini kekurangan anggaran dalam emunjang pelaksanaan persidangan (rapat koordinasi tingkat menteri, sehingga realisasinya hampir 100%. Sedangkan pada layanan BMN realisasinya cukup jauh dari pagu yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan pengelolaan BMN pelaksanaannya lebih banyak di kantor dan mengurangi kegiatan di luar kantor (perjalanan dinas).

Tabel 33 Realiasi Keuangan per Keluaran Setmenko Kemaritiman Tahun 2018

Kode	Program	Pagu	Realisasi	Persentase
5.601.951	Layanan Internal (Overhead)	6.250.000.000	6.241.542.775	99,86%
5.601.954	Layanan Manajemen SDM	6.266.256.000	6.118.286.261	97,64%
5.601.955	Layanan Manajemen Keuangan	3.634.050.000	3.503.440.070	96,41%
5.601.956	Layanan Manajemen BMN	396.870.000	349.265.457	88,01%
5.601.959	Layanan Protokoler	30.508.795.000	28.970.118.744	94,96%
5.601.962	Layanan Umum	1.973.934.000	1.700.568.239	86,15%
5.601.994	Layanan Perkantoran	88.076.486.000	84.459.700.051	95,89%
5.602.001	Layanan Pengelolaan Kerjasama	3.877.447.000	3.786.292.317	85,71%
5.602.952	Layanan Perencanaan	5.134.627.000	3.996.697.000	81,41%
5.602.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.750.000.000	2.408.569.826	87,58%
5.602.961	Layanan Reformasi Birokrasi	4.987.199.000	4.010.744.522	85,84%
5.602.999	Output Cadangan (Cadangan)	2.776.039.000	0	0,00%
5.603.001	Layanan Persidangan	2.039.414.000	1.963.954.093	96,30%
5.603.957	Layanan Hukum	900.535.000	833.129.497	92,51%
5.603.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	4.119.071.000	3.902.752.534	94,75%
5.603.963	Layanan Data dan Informasi	8.126.980.000	7.997.966.945	98,41%
5.604.001	Layanan Audit Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	3.500.000.000	3.156.559.996	90,19%
5.748.001	Rekomendasi Penguatan dan Penataan Regulasi dan kelembagaan Kemaritiman	1.800.000.000	1.361.576.639	75,64%
Jumlah		177.117.703.000	164.761.164.966	93,02%

Dari tabel 33 di atas terlihat bahwa pada umumnya realisasi keuangan 2019 terjadi peningkatan dibanding tahun 2018.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

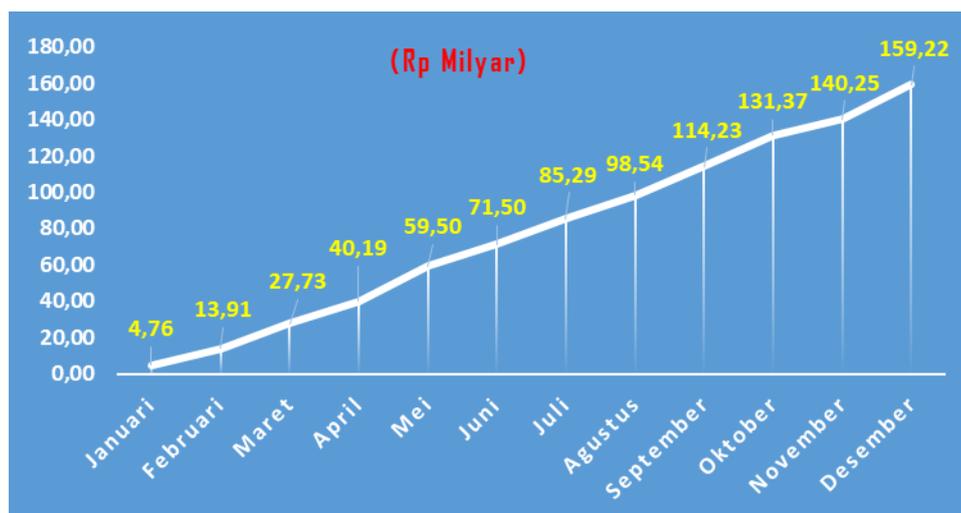
Sementara itu, rincian realisasi penggunaan anggaran di Setmenko Kemaritiman TA. 2019 seperti yang tertera pada tabel 34, semakin meningkat per bulannya.

Tabel 34 Realisasi Keuangan per bulan Setmenko Kemaritiman TA. 2019

Bulan	Bulanan	Persentase	Akumulasi	Persentase
Januari	4.763.981.127	2,97%	4.763.981.127	2,97%
Februari	9.145.640.673	5,70%	13.909.621.800	8,69%
Maret	13.828.088.091	8,71%	27.735.909.891	17,33%
April	12.456.260.312	7,77%	40.192.170.203	25,12%
Mei	19.378.616.125	12,09%	59.570.786.328	37,23%
Juni	11.847.503.074	7,44%	71.505.606.989	44,61%
Juli	13.783.655.949	8,42%	85.289.262.938	52,13%
Agustus	13.257.537.857	8,10%	98.546.800.795	60,23%
September	15.184.778.958	9,59%	114.237.619.789	69,82%
Oktober	26.739.751.335	16,34%	131.369.085.834	80,30%
November	18.169.702.057	11,10%	140.252.223.034	85,73% ^o
Desember	29.709.282.721	18,16%	159.224.515.281	97,32

Dari tabel dan grafik terlihat bahwa secara kumulasi, realisasi anggaran Setmenko Kemaritiman pada TA. 2019 cenderung naik dengan peningkatan yang cenderung stabil.

Gambar 8 Grafik Realisasi Keuangan Setmenko Kemaritiman TA. 2019



3.3. Analisa Kondisi Sumber Daya Pegawai

Secara umum, pada TA. 2019 di lingkup Setmenko Kemaritiman masih kekurangan pegawai, terutama staf bagian administrasi dan keuangan, staf bagian



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

hukum. Setmenko Kemaritiman sampai saat ini belum menyusun kebutuhan jumlah pegawai dan peta jabatannya. Komposisi jumlah sumber daya manusia pada Setmenko Kemaritiman sampai dengan akhir TA. 2019 berjumlah 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) orang yang terdiri dari unsur pegawai PNS 147 (seratus empat puluh tujuh) orang, serta pegawai non-PNS (JPT Madya, Tenaga Ahli, dan Penasehat Khusus dan tenaga kerja kontrak) sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang, serta tenaga pendukung (satpam, pengemudi, pramubakti, dan petugas kebersihan) 146 (seratus empat puluh enam) orang.

Adapun keragaman pegawai Setmenko Kemaritiman berdasarkan jenjang jabatan pada tabel berikut ini:

Tabel 35 Jumlah Kondisi Pegawai Setmenko Kemaritiman

Jabatan	Biro				Jumlah	Kebutuhan	
	Biro Umum	Perencanaan dan Informasi	Biro Hukum	Inspektorat			
JPT Madya	3	-	-	-	3	5	
JPT Pratama	1	1	1	1	4	4	
Jabatan Administrator	4	4	3	-	12	12	
Jabatan Pengawas	12	10	10	1	33	33	
Jabatan Pelaksana Administratif	PNS	43	18	12	12	161	
	Tenaga Kontrak	33	20	9	4		
Jabatan Fungsional	Ahli	1			1		2
	Terampil						0
Staf Khusus	5				5		
Penasehat Khusus	6				6		
Tenaga Ahli	17				17		
Tenaga Pendukung							
Satpam	-	-	-	-	48		
Pengemudi	-	-	-	-	41		
Pramubakti	-	-	-	-	29		
Petugas Kebersihan	-	-	-	-	26		
Jumlah	135	42	45	19	387		

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa masih ada beberapa yang perlu di isi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (Eselon 1.b) masih kekurangan 2 (dua) orang, yaitu Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Laut dan Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas, Asisten Deputy Hukum Dan Perjanjian Maritim, Jabatan Administrator (Eselon III.a) masih ada yang lowong antara lain Kepala Bidang Industri Dasar, Kepala Bidang Pengelolaan SDM, Kepala Bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan dan Jabatan Pengawas (Eselon IV.a) Kepala Subbagian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi



IV. PENUTUP

Pencapaian kinerja Setmenko Kemaritiman TA. 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. secara umum, capaian kinerja Setmenko Kemaritiman telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 102,52% atau menurun 0,67% dibanding tahun 2018.
2. keberhasilan capaian kinerja didasarkan pada:
 - a. pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing pelaksana;
 - b. dukungan dan komitmen dari pimpinan;
 - c. dukungan sarana dan prasarana serta anggaran.
 - d. target yang ditetapkan realistis untuk dapat dicapai
3. beberapa kendala dalam pencapaian target, baik keuangan maupun kinerja di Setmenko Kemaritiman adalah sebagai berikut:
 - a. Perubahan nomenklatur 2 biro dan beberapa eselon III dan IV. Perubahan ini menyebabkan sempat terjadi keraguan dalam penggunaan anggaran, apakah sesuai dengan mata anggaran serta dapat diterima oleh KPPN
 - b. Terdapat eselon III dan eselon IV yang baru, sehingga pelaksana perlu melakukan adaptasi dalam pemahaman kerja, serta tugas dan fungsinya
 - c. Sempat terjadi kevakuman pejabat sesuai dengan nomenklatur yang baru
 - d. Masih kurangnya jumlah tenaga pegawai (terutama pelaksana teknis sesuai unitnya) Setmenko Kemaritiman serta unit eselon I lainnya di lingkup Kemenko Kemaritiman. Dapat dinyatakan bahwa seluruh indikator kinerja Setmenko memerlukan kerja sama dari seluruh unit kerja di kementerian.
 - e. Terdapatnya beberapa penugasan dan atau kegiatan yang saling bersilangan fungsi dan target, atau penugasan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan tidak dianggarkan.
4. untuk peningkatan capaian kinerja direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penyusunan peta jabatan, standar kompetensi jabatan serta analisa beban kerja pegawai dilaksanakan lebih intensif
 - b. penugasan unit kerja yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi ketatausahaan baik di tingkat Biro maupun Setmenko, dengan memaksimalkan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Sesmenko
 - c. pengisian SDM dengan status PNS dan penempatan sesuai nomenklatur jabatan (SK pengangkatan jabatan), sehingga selain menunjang kinerja organisasi secara optimal juga dapat memberikan kemudahan peningkatan karir pegawai dengan baik, jelas dan adil
 - d. peningkatan pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan terhadap tugas dan fungsi antara lain dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan;



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

- e. optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menunjang pelaksanaan fungsi pelayanan yang cepat, tepat dan meminimalkan terjadinya kesalahan (*error*);
- f. melaksanakan disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan serta pertanggungjawaban sesuai jadwal (tepat waktu),
- g. perbaikan sasaran dan indikator serta target kinerja.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Agus Purwoto**
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Luhut B. Pandjaitan**
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Januari 2019

PIHAK KEDUA,

Luhut B. Pandjaitan

PIHAK PERTAMA,

Agus Purwoto



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIS MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

TARGET KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
Customer Perspective				
SS.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemenko Bidang Kemaritiman	1	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Kemaritiman	70
		2	Nilai Evaluasi SAKIP Kemenko Bidang Kemaritiman	70
		3	Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2
		4	Opini BPK	WTP
		5	Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman	3
Internal Business Process Perspective				
SS.2	Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal di Kemenko Bidang Kemaritiman	6	Persentase Kepuasan Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data dan Informasi	70%
SS.3	Meningkatnya Layanan Kehumasan	7	Persentase Publikasi	70 %
		8	Persentase Opini Publik yang Positif	70 %
		9	Persentase Layanan Dokumentasi	75 %
SS.4	Tersedianya Layanan Persidangan yang Efektif	10	Persentase Kepuasan Layanan Persidangan	80%
SS.5	Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi	11	Persentase Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	80%
		12	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum	80%
		13	Persentase Pemenuhan SOP Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	80%
SS.6	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Manusia dan BMN yang handal	14	Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50%
		15	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Kebutuhan Pegawai Kemenko Bidang Kemaritiman	80%



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
SS.7	Terwujudnya Sistem Perencanaan dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang Akurat	16	Persentase Penerapan SAKIP di Kemenko Bidang Kemaritiman	100%
		17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90
		18	Persentase Konsistensi Perencanaan	90%
SS.8	Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan yang Baik	19	Jumlah Kebijakan / Rancangan Kebijakan Manajerial yang Dihasilkan	15
Learning and Growth Perspective				
SS.9	Organisasi dan Tata Kelola yang Baik di Sekretariat Kemenko	20	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Kemenko	70
SS.10	Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel di Sekretariat Kemenko	21	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP atas Laporan Keuangan dan BMN	100%

ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2019

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Rp 130.044.807.000,-
2	Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Kerjasama, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp 11.339.808.000,-
3	Pengelolaan Informasi, Persidangan, Kehumasan, Administrasi Hukum dan Organisasi	Rp 13.818.498.000,-
4	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Kemaritiman	Rp 3.500.000.000,-
5	Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional	Rp 1.570.717.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp 160.273.830.000,-

Jakarta, 18 Januari 2019

Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman RI


Luhut B. Pandjaitan

Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman


Agus Purwoto